**PENERAPAN QANUN NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG MINUMAN
KHAMAR DAN SEJENISNYA DI WILAYAH HUKUM KOTA
SUBULUSSALAM, NAD**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)

Oleh :

Ali Geno Berutu
107043101922

**PROGRAM STUDY PERBANDINGAN MADZHAB HUKUM
KONSENTRASI PERBANDINGAN MADZHAB FIQH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1432 H/2011 M**

**PENERAPAN QANUN NOMOR 12 TAHUN 2003
TENTANG MINUMAN KHAMAR DAN SE JENISNYA DI WILAYAH
HUKUM KOTA SUBULUSSALAM, NAD**

Skripsi diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

Oleh:

Ali Geno Berutu
107043101922

Pembimbing I

Dewi Sukarti. MA
NIP. 197208172001122001

Pembimbing II

A. Bisryi Abd. Shamad. MA
Nip.196803202000031001

**PROGRAM STUDY PERBANDINGAN MADZHAB HUKUM
KONSENTRASI PERBANDINGAN MADZHAB FIQH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA 1432 H/2011 M**

ABSTRAK

Ali Geno Berutu NIM : 107043101922. Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang sejak tahun 1999 telah mendapatkan hak untuk menerapkan hukum Islam secara penuh. Dikenal sebagai "Serambi Mekkah", Aceh terkenal sebagai salah satu daerah di Indonesia yang tradisi Islamnya amat kuat. Di satu pihak, menjadi orang Aceh berarti berasal dari kelompok etnis yang berbahasa Aceh. Di pihak lain, berarti hidup dimanapun yang berada dalam lingkup kesultanan Aceh di masa lampau dan merasa memiliki hubungan yang erat dengan sejarahnya. Identitas masyarakat Aceh tak pernah didasarkan hanya kepada ajaran Islam saja. Ketaatan mereka terhadap ajaran Islam tak berarti mereka radikal.

Lampu hijau untuk menerapkan hukum Islam pada tahun 1999 merupakan bagian dari sebuah upaya setelah jatuhnya Presiden Soeharto untuk mendapatkan sebuah penyelesaian politik atas konflik yang terjadi di Aceh. Hal ini lebih didasarkan atas penilaian dari elit politis Jakarta dan Aceh mengenai apa yang dapat meredam sebuah daerah yang menderita oleh konflik, pelanggaran HAM dan eksploitasi ekonomi selama bertahun-tahun, daripada atas tuntutan masyarakat. Tetapi hukum Islam memang mendapatkan dukungan, khususnya karena sistem peradilan biasa yang jarang sekali memberikan keadilan bagi masyarakat Aceh, sudah tidak berfungsi sama sekali akibat perang.

Hukum Islam adalah hal yang diinginkan oleh rakyat Aceh, Untuk mengawasi kebijakan-kebijakan ini, pada 2001 pemerintah provinsi membentuk Dinas Syari'at Islam. Fungsinya adalah untuk menyusun rancangan peraturan dalam rangka penyelenggaraan hukum Islam, yang belakangan disebut qanun; mengawasi pelatihan bagi personil Dinas Syari'at Islam; memastikan ketertiban fungsi tempat ibadah dan fasilitas Islam lainnya; memberikan bimbingan dan penyuluhan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum Islam dan mengawasi warga mentaatinya. Dinas ini merupakan sebuah birokrasi keagamaan yang benar-benar baru, memberi lapangan kerja bagi ratusan orang dan juga punya kepentingan untuk memperluas penerapan Syari'at.

Kata Kunci = Penerapan Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang
Minuman Khamar dan Sejenisnya di wilayah Hukum Kota
Subulussalam, NAD.

Pembimbing = Dewi Sukarti, MA
H.A. Bisri Abd Shomad, MA

Daftar Pustaka= 1974 s/d 2010

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan gelar sarjana satu di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

Jakarta, 20 November 2011

Penulis

Ali Geno Berutu
NIM. 107043101922

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul **PENERAPAN QANUN NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG MINUMAN KHAMAR DAN SEJENISNYA DI WILAYAH HUKUM KOTA SUBULUSSALAM, NAD**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 14 Desember 2011. skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy) pada Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum.

Jakarta, 14 Desember 2011

Mengesahkan

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM

NIP : 195505051982031012

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH

1. Ketua : Dr. H. Muhammad Taufiqi, M.Ag
NIP. 1965111919980310002
2. Sekretaris : Fahmi Muhammad Ahmadi, M.Si
NIP. 197412132003121002
3. Pembimbing I : Dewi Sukarti, MA
NIP. 197208172001122001
4. Pembimbing II : H.A. Bisyri Abdul Shamad, MA
NIP. 196803202000031001
5. Penguji I : Dr. H. Muhammad Taufiqi, M.Ag
NIP. 1965111919980310002
6. Penguji II : Dr. Phil. JM Muslimin, MA
NIP. 19680121999031014

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., yang telah memberikan petunjuk dan pertolongan sehingga skripsi ini selesai dengan judul **“Penerapan Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya di Wilayah Hukum Kota Subulussalam, Nangroe Aceh Darussalam.”** Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW., beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah menuntun manusia ke jalan yang benar, di jalan yang diridhai Allah SWT.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang ada, baik dari segi kemampuan berfikir maupun fasilitasnya; sudah barang tentu dari berbagai segi dalam skripsi ini masih banyak kekurangannya. Sungguhpun demikian, penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini. Yang dalam prosesnya tidak sedikit cobaan dan hambatan yang harus dihadapi, namun alhamdulillah, atas bantuan, saran, dan bimbingan dari semua pihak memberikan kemudahan bagi penulis sehingga skripsi akhirnya dapat terselesaikan.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yakni Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH. M.A.

2. Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, yakni Bapak Dr. Muhammad Taufiqi, M.A., dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, yakni Bapak Fahmi Muhammad Ahmadi, Ms,i.
3. Dosen Pembimbing Skripsi, yakni Ibu Dewi Sukarti, M.A. dan Bapak A. Bisyri Abd. Shamad, M.A.
4. Dosen Pembimbing Akademik, yakni Ibu Dr. Mesraini, M.Ag.
5. Seluruh Dosen, Staf dan Karyawan FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan pengetahuan, pemahaman dan pelayanan selama melaksanakan studi.
6. Seluruh Staf Perpustakaan Utama dan Perpustakaan FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan kemudahan baik selama studi maupun dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Jajaran, Staf dan Karyawan Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam. Terutama Bapak Drs. H. Burhanuddin Berkat, SH., selaku Kepala Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam.
8. Seluruh Jajaran, Staf dan Karyawan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Subulussalam. Terutama Bapak Sahidin. SH. Selaku Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Subulussalam.
9. Ayahanda Saruddin Berutu yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis serta selalu memberikan nasihat dan semangat bagi penulis dalam meniti hidup yang lebih baik dan ibunda Hebat Karo-Karo yang

tercinta, yang telah merawat dan mendidik dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, memberikan pengorbanan yang tidak terhitung nilainya baik moril maupun materil, dengan memberikan dorongan serta selalu mendoakan penulis dalam menempuh hidup ini.

10. Bapak Ir.H. Hery Moleanto dan Ibu Dra. Hj. Tita Rufida yang telah membantu penulis dalam segal hal dengan sepuh hati, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah bapak dan dan ibu telah berikan kepada penulis.
11. Ketua Rabitah Thaliban Aceh cabang Kota Subulusslam, Bapak Wilda Sastra S.Sos.i
12. Seluruh Masyarakat Kota Subulussalam, Khususnya Bapak Ustad Yusman Afriyanto.
13. Seluruh Pemuda/i Kota Subulussalam, Khususnya Zendri Belli Dinata yang telah bersedia berbagi pengalaman dengan penulis.
14. Tak lupa pula Kakak dan Abang tercinta, Kak ILam beserta Suami, Bang Syawal beserta Istri ,Kak Hotma beserta Suami, Bang Ainal beserta Istri, serta adikku Rizki,Zul, Pandi dan Agus yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Serta ponakanponakanku; Ica, Fiqri, Sukri, Praja, Ismail dan Bilqis terimakasih selalu membuat Tonga/Pun Ali tersenyum dengan polah tingkah laku kalian yang lucu.
15. Terimakasih juga buat seluruh teman-teman kelas B PMH/PMF angkatan 2007 yang telah berjuang bersama selama kuliah. Dan .so special. buat Ardi,

Wisnu, Ozzie, Ulfah, dan Vera, terimakasih kalian telah menjadi sahabat; tempat berbagi cerita, tawa dan tangis, Thanks for everything my best friend.

16. Sahabat-Sahabat Kesatuan Aksi Mahasiswa Subulussalam Jakarta (KAMSAS): Hasby Maha, Asdi Kombih, Izen Prangin-angin, Hamsal Manik, Mashur Lingga, Yudi Fireza dan Abdul Aziz Berutu, terimakasih telah memberikan kebersamaan yang amat sangat berkesan dan bermakna; mata, hati dan pikiranku terbuka dan tau tentang setengah dunia bersama kalian. Kepada Allah jualah kita menyerahkan segala urusan. Semoga amal baik semua pihak diterima oleh Allah SWT., dan skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca pada umumnya.

Jakarta, 7 Agustus 2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Skripsi	7
D. Reviw Studi Terdahulu	8
E. Metodologi dan Teknik Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	15

BAB II KAJIAN TEORITIS SEPUTAR PEMBERLAKUAN SYARIAT ISLAM DI ACEH

A. Sejarah Syariat Islam di Aceh	16
B. Syariat Islam Suatu Keharusan Untuk Aceh.....	24
C. Syariah dan Pendekatan Qanun Aceh	27

D. Kewajiban Menegakkan Syariat Islam.....	30
--	----

BAB III QANUN NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG MINUMAN KHAMAR DAN SEJENISNYA

A. Tempat, tanggal disahkan dan isi Qanun Nomor 12 Tahun 2003	34
B. Pengertian Khamar Menurut Qanun Nomor 12 Tahun 2003.....	35
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Pelarangan Minuman Khamar dan Sejenisnya	35
D. Sannksi Terhadap pelanggar Qanun Nomor 13 Tahun 2003	37
E. Jarimah Khamar dan Sejenisnya Serta Uqubatnya	39
F. Pelaksanaan Qanun Nomor 12 Tahun 2003.....	42
G. Tugas dan Fungsi Mahkamah Syariy'ah dalam Menjalankan Peradilan di Aceh	43
H. Wilayatul Hisbah Sebagai Penegak Hukum Utama yang bernuansa Syariah di Aceh.....	47

BAB IV ANALISA TENTANG PROBLEMATIKA PENERAPAN QANUN NOMOR 12 TAHUN 2003 DI KOTA SUBULUSSALAM

A. Kaidah Hukum	51
B. Penegak Hukum	57
C. Sarana/Fasilitas	68
D. Warga Masyarakat	69

BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	75
	B. Saran-saran	77
DAFTAR PUSTAKA		79
LAMPIRAN.....		82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam telah secara formal diimplementasikan di Nanggroe Aceh Darussalam sejak diundangkannya Undang-Undang No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam¹.

Penerapan Syariat Islam di Tanah Rencong sesungguhnya sangat berkaitan dengan rakyat Aceh sebagai Muslim yang taat dan mau menjalankan Syari'at Islam secara *kaffah*. keinginan untuk mengembalikan identitas rakyat Aceh sebagai Muslim yang taat melalui pengimplementasian Syari'at Islam secara menyeluruh dengan sangat jelas dapat dilihat dan tercermin dalam berbagai peraturan daerah yang merupakan bagian dari Qanun Propinsi Nangroe Aceh Darussalam. Pernyataan bahwa Islam bagi orang Aceh bukan hanya berarti agama, tetapi juga pedoman hidup dan bagian dari budaya orang Aceh selalu menjadi landasan berpikir mengapa Syari'at Islam perlu diterapkan dan diimplementasikan di Aceh.² Dalam penjelasan

¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 114, Tambahan Lembaran Negara No. 41, h, 34.

² Prof. A. Hasjmy, *50 Tahun Aceh Membangun*, 1995, h. 36.

atas Qanun Propinsi Nangroe Aceh Darussalam No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang Akidah, Ibadah, dan Syiar Islam disebutkan :

Sepanjang sejarah masyarakat Aceh telah menjadikan agama Islam sebagai pedoman dalam kehidupan, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam rentang sejarah yang cukup panjang itulah telah melahirkan suasana masyarakat dan budaya Aceh yang Islami, budaya dan adat yang lahir dari renungan para ulama, kemudian dipraktekan, dikembangkan dan dilestarikan³.

Karena penerapan Syariat Islam secara formal⁴ di Aceh berkaitan erat dengan identitas masyarakat Aceh, tidaklah heran jika penerapan Syari'at Islam pertama-tama digalakkan lebih bersifat simbolis, bukan hal-hal yang lebih Islami dalam artian yang lebih signifikan seperti pemberantasan Korupsi dan Kolusi⁵. Penerapan Syari'at Islam lebih dipokuskan untuk sementara ini pada penggunaan busana muslim, pengaturan ibadah shalat Jum'at dan Ibadah Puasa Ramadhan serta pelarangan aliran sesat dan tindakan *Munkarat* seperti minuman keras beralkohol, perjudian dan perzinahan.

Larangan minuman keras beralkohol dan sejenisnya telah diatur melalui Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang *Khamar* (minuman keras dan sejenisnya), secara substantif tidak memiliki kontradiksi dengan produk perundang-undangan lainnya. Penyebutan produk perundang-undangan lain dalam konsideran qanun ini

³ Masykuri Abdillah, dkk. *Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia, Sebuah Pergulatan yang tak Pernah Tuntas*, Jakarta : Renaissance, 2005, h. 212.

⁴ Perlu diingat bahwa secara tidak formal Syari'at Islam tetap dipraktekan oleh masyarakat Aceh.

⁵ Masykuri Abdillah, dkk. *Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia, Sebuah Pergulatan yang tak Pernah Tuntas*, h. 213.

menunjukkan bahwa qanun tersebut secara materil melandaskan diri pada produk undang-undang tersebut. Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman beralkohol dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1997 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol di Daerah, dilihat dari sudut pendelegasian kewenangan penyusunan perundang-undangan, telah mengkonfirmasi bahwa Qanun Khamar tidak mengalami kontradiksi dengan undang-undang lainnya.

Untuk efektifitas pelaksanaan qanun ini di samping adanya lembaga penyidikan dan penuntutan, juga dilakukan pengawasan yang meliputi upaya pembinaan sipelaku *jarimah* minuman khamar oleh Pejabat *Wilayatul Hisbah*⁶. Disamping itu juga kepada masyarakat diberikan peranan untuk mencegah terjadinya jarimah minuman khamar dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim untuk melakukan *amar ma'ruf nahi mungkar* tapi Peranserta masyarakat tersebut tidak dalam bentuk main hakim sendiri.

Bentuk ancaman hukuman (*uqubat*) cambuk bagi sipelaku jarimah minuman khamar dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi si pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi calon pelanggar lainnya untuk tidak melakukan jarimah. Di samping itu '*uqubat* cambuk akan lebih efektif karena memberi rasa malu dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarga. Jenis '*uqubat* cambuk juga berdampak pada biaya

⁶*Wilayatul Hisbah* adalah lembaga yang bertugas menegakkan amar makruf apabila jelas-jelas ditinggalakan (*zahara tarjuhu*) dan mencegah kemungkaran yang jelas-jelas dilakukan (*zahar fi'luhu*).

yang harus ditanggung pemerintah menjadi lebih murah dibandingkan dengan jenis *'uqubat* lainnya seperti yang dikenal dalam KUHP sekarang ini.⁷

Secara umum, materi muatan Qanun *Khamar* sama persis dengan isi Keppres di atas. Perbedaan yang paling prinsip terletak pada lingkup larangannya. Keppres No. 3 Tahun 1997 menyebutkan bahwa memproduksi, mengedarkan dan mengkonsumsi masih diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Larangan mengkonsumsi juga tidak berlaku di tempat-tempat khusus, seperti hotel, bar, dan lain sebagainya. Keppres hanya tegas melarang memperjualbelikan minuman beralkohol kepada siapa saja yang masih berusia di bawah dua puluh lima tahun⁸. Hal itu berarti, sebenarnya tidak ada larangan meminum alkohol, sejauh mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan.

Sementara Qanun Khamar, secara tegas melarang kepada siapa saja (subyek hukum qanun, umat Islam yang berdomisili di Provinsi NAD) untuk meminum minuman beralkohol. Tidak hanya mengkonsumsi, badan hukum atau badan usaha juga dilarang memproduksi, menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan, menghadiahkan, dan

⁷Penjelasan Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang minuman Khamar dan Sejenisnya. Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Nangroe Aceh Aceh Darussalam.

⁸ Pasal 5 Keppres No. 3 Tahun 1997 “Dilarang mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) kepada yang belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun”.

mempromosikan minuman *khamar* dan sejenisnya⁹. Larangan secara total yang diatur oleh Qanun *Khamar* juga dibenarkan oleh Keppres No. 3 Tahun 1997 itu.

Di dalam Keppres disebutkan secara jelas bahwa penggunaan minuman beralkohol sepenuhnya diserahkan kepada pengaturan dan izin yang diberikan oleh gubernur atau bupati. Dengan demikian, sekali lagi, larangan minuman beralkohol di NAD, sebagai produk politik di tingkat lokal, memiliki *justifikasi yuridis* dan tidak bertentangan dengan produk perundang-undangan di atasnya.

Sebagai sebuah kebijakan daerah, penerapan Syariat Islam di Aceh mendapat dukungan dari Pemerintah Aceh sendiri. Pemerintah Aceh membuat sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu Dinas Syariat Islam untuk secara khusus menangani pemberlakuan Syariat Islam. Selain itu juga dibentuk sebuah Polisi pengawal Syariat yang dikenal dengan *Wilayatul Hisbah*.¹⁰

Kelembagaan pemerintah ini merupakan pelaksana teknis pemberlakuan Syariat Islam di Aceh. Meskipun demikian dalam berbagai kesempatan perwakilan pemerintah selalu mengatakan bahwa penerapan syariaat Islam bukanlah tugas dari Dinas Syariat Islam semata, namun sebagai seorang muslim, penerapan syariat Islam adalah bagian dari tugas personal kaum muslimin itu sendiri. Sementara pemerintah hanya berperan dalam perencanaan, penggerak dan memberikan fasilitas utama dalam merealisasikan apa yang dapat dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan ajaran Islam.

⁹ Pasal 4-6 *Qanun Khamar* No. 12 Tahun 2003.

¹⁰ Awalnya WH merupakan sebuah sub dalam Dinas Syariat Islam. Namun atas dasar pertimbangan mereka bertugas memastikan berjalannya peraturan daerah (*qanun*) seperti halnya Polisi Pamong Praja, maka pada tahun 2006 digabungkan di bawah Satpol PP. Namun demikian ini adalah kebijakan yang independen setiap pemerintah kabupaten Kota. DI Aceh Besar, Wilayatul Hisabah bergabung dengan Dinas Pemadam Kebakaran.

Lembaga keagamaan lain yang sepenuhnya mendukung pemberlakuan Syariat Islam adalah kelembagaan ulama. Selain Majelis Permusyawarana Ulama (MPU)¹¹ lembaga keulamaan seperti Inshafuddin, Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA) dan berbagai kelembagaan ulama yang lain juga mendukung pemberlakuan syariat Islam di Aceh.

Berdasarkan uraian diatas penulis mencoba mengajukan skripsi dengan judul PENERAPAN QANUN NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG MINUMAN KHAMAR DAN SEJENISNYA DI WILAYAH HUKUM KOTA SUBULUSSALAM NANGROE ACEH DARUSSALAM.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Berawal dari latar belakang diatas, penulis membatasi masalah yang berkaitan langsung dengan judul skripsi ini yaitu, Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2003 di Wilayah Hukum Kota Subulussalam. Selanjutnya penulis memfokuskan pada sebab, kendala dalam penerapan Qanun Nomor 12 Tentang Minuman Khamar dan Sejanisnya di Kota Subulussalam NAD.

¹¹ MPU adalah lembaga keulmaan seperti Majelis Ulama Indonseia (MUI) di daerah lain di Indonesia. Namun MPU di Aceh memiliki kewenangan yang lebih besar daripada MUI. MPU adalah lembaga daerah setingkat DPRA yang memiliki kapasitas untuk mengeluarkan keputusan sendiri dan memiliki anggaran sendiri. Lembaga ini memiliki hak preogatif dalam memberikan izin penyelenggaraan acara-acara yang dianggap memungkinkan terjadinya pelanggaran Syariat Islam, seperti konser band ibukota dan lain sebagainya.

2. Perumusan Masalah

Dari batasan-batasan yang telah dikemukakan di atas, penulis juga membuat rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Adakah problem dalam penerapan Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar dan Sesenisnya di Aceh.?
- b. Bagaimanakah dukungan pemerintah dan masyarakat Kota Subulussalam terhadap aplikasi Qanun Nomor 12 Tahun 2003.?
- c. Adakah kendala yang dihadapi dalam penerapan Qanun No 12 Tahun 2003 di Wilayah Hukum Kota Subulussalam.?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Skripsi

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya di wilayah hukum Kota Subulussalam.
2. Untuk mengetahui dukungan pemerintah dan masyarakat Kota Subulussalam dalam menerapkan Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamar dan Sejenisnya di wilayah hukum Kota Subulussalam.
3. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi dalam penerapan Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya di wilayah Hukum Kota Subulussalam.

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Dapat berguna bagi semua pihak dan khususnya pemerintah Kota Subulussalam dalam menjalankan suatu kebijakan pemerintahan yang akan datang.
2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna terutama bagi diri penulis sendiri untuk dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan dapat pula menjadi bahan masukan bagi para pihak yang terkait dalam penegakan Syari'at Islam khususnya di kota Subulusslam.
3. Memberi masukan yang berguna bagi Dinas Syariat Islam dan *Wilayatul Hisbah* (WH) Kota Subulussalam selaku tempat pelaksanaan penelitian.

D. Review Studi Terdahulu

Dalam review kajian terdahulu penulis membaca dan mendata skripsi yang telah membahas tentang Syariat Islam di Aceh, setidaknya ada beberapa skripsi yang penulis temukan yaitu :

1. Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Cambuk terhadap Pelanggaran Qanun dibidang Syariat Islam di Wilayah Hukum Kota Madiya Banda Aceh, NAD, ditulis oleh Ferdiansyah yang dikaji di Fakultas Hukum Universitas Sumaatra Utara (USU) Tahun 2008. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimanakah pengaturan pidana dan hukumnya dalam qanun propinsi Nangroe Aceh Darussalam dan bagaimanakah Efektifitas penerapan sanksi pidana cambuk terhadap pelanggaran Qanun bidang Syariat Islam di Kota madya Banda Aceh.

2. Gambaran Coping Sters pada Wilayatul Hisbah yang ditempatkan di desa, ditulis oleh Rena Kirrana Arlatos yang dikaji di Fakultas Psikologi Universitas Sumatra Utara (USU) Tahun 2009. Dalam Skripsi ini membahas tentang apa yang menjadi sumber stress pada Wilayatul Hisbah yang ditempatkan didesa.
3. Penerapan Syari'at Islam dalam Pengaruhnya Terhadap Angka Kejahatan, studi pemberlakuan Qanun yang meengatur tentang Khamar, Maisir dan Khalwat di Nangroe Aceh Darussalam. Dikaji di Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2007. Dalam skripsi ini dibahas mengenai apa dasar filosofi pemberlakuan Qanun tentang Khamar, maisir dan Khalwat di Nangroe Aceh Darussalam, gambaran secara umum jumlah criminal berkaitan dengan formalisasi syari'at Islam serta bagaimana tanggapan masyarakat tentang aplikasi Qanun yang mengatur tentang Khamar, Maisir dan Khalwat di Nangroe Aceh Darussalam.

E. Metode Penelitian dan Teknik Penulisan

1. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan metode pendekatan Sosiologis, yaitu ilmu kemasyarakatan yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan sosial. Sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat.

2. Jenis dan Sifat Data

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam mencari, menelusuri, melacak, menjelaskan dan menyampaikan objek atau sasaran peneliti adalah sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Adapun jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yakni deskripsi berupa kata-kata, ungkapan, norma atau aturan-aturan dari fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, penulis berupaya mengupas dan mencermati sesuatu secara alami dan kualitatif mengenai penerapan Qanun nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamar di wilayah hukum Kota Subulussalam.

Sedangkan sifat data dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian yang bersifat dekriptif analitis yakni penelitian yang menggambarkan data dan informasi di lapangan berdasarkan fakta yang diperoleh secara mendalam. Dengan kata lain penelitian ini untuk menggambarkan penerapan Qanun nomor 13 Tahun 2003 tentang Khamar di wilayah hukum Kota Subulussalam. Penelitian ini juga termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), pada tahap kepustakaan, penelitian ini merupakan kegiatan telaah pustaka dengan teknik dokumentasi terhadap sumber-sumber buku yang dapat dijadikan acuan dalam menelaah suatu penelitian. Dan dalam penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu melakukan penelitian lapangan yang pelaksanaannya terjun langsung ke Dinas Syari'at Islam Kota Subulussalam

yang tujuannya untuk memperoleh data yang valid dan akurat. Penulis juga akan mengadakan wawancara kepada masyarakat Kota Subulussalam.

b. Sumber Data

Untuk mengumpulkan data dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu :

1) Dara Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung yakni berupa peraturan perundang-undangan dan Qanun yang telah ada, dalam hal ini Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh dan Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang minuman *Khamar* dan sejenisnya, mengadakan wawancara ke Dinas Syari'at Islam, *Wilayatul Hisbah* dan Tokoh Masyarakat Kota Subulussalam.

2) Data Sekunder

Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang didapatkan dan diambil oleh peneliti dari sumber lain yang berkaitan dengan objek penelitian seperti dokumen-dokumen, buku, Skripsi, Tesis dan media cetak seperti Koran dan Majalah

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah:

a. Metode wawancara

Wawancara adalah pencakapan dengan maksud tertentu. Pencakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dilakukan untuk mengungkap data mengenai pelaksanaan Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya di wilayah Hukum Kota Subulussalam. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai Kepala Dinas terkait yaitu Kepala Dinas Syari'at Islam dan Kepala Dinas Satuan polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dan *Wilayatuul Hisbah* (WH) Kota Subulussalam, Da'i perbatsasn, serta para tokoh masyarakat, Aktivis Syari'at Islam dan Masyarakat Kota Subulussalam.

b. Metode studi dokumentasi

Dokumentasi diartikan sebagai cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Studi dokumentasi ini digunakan penulis untuk melengkapi data yang ada, seperti undang-undang dan atau Qanun yang mengatur tentang kebijakan penerapan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam.

c. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah studi yang digunakan untuk memperoleh konsep-konsep ilmiah dari buku-buku mengenai pendapat dan teori uu tentang Syariat Islam yang dapat di jadikan bahan acuan dan berkaitan dengan

masalah yang diteliti. Disini penulis mendapatkan informasi yang bersumber dari buku–buku, skripsi, tesis, kumpulan makalah dan dari internet.

d. Metode Observasi

Pada metode ini penulis melakukan pengamatan langsung terhadap pengawasan serta pelanggaran terhadap Qanun Nomor 12 Tahun 2003 di lapangan, guna untuk memperoleh hasil yang maksimal, penulis akan dibantu oleh Instansi-instansi yang terkait langsung dengan penerapan Syari’at Islam di Kota Subulussalam seperti Dinas Syari’at Islam Kota Subulussalam, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dan *Wilayatul Hisbah* (WH) Kota Subulussalam serta masyarakat Kota Subulussalam.

e. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan teknik analisis data secara kualitatif yaitu data yang diperoleh, dipilih dan disusun secara sistematis kemudian dianalisa untuk mendapatkan data yang diperlukan, selanjutnya disusun sebagai karya ilmiah dalam bentuk penulisan buku. Model analisis data tersebut sesuai untuk menggambarkan tentang penerapan Qanun nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya di wilayah hukum Kota Subulussalam.

Teknik yang digunakan dalam pengolahan data tersebut yaitu pengklasifikasian data. Pengklasifikasian data yaitu menggolongkan aneka ragam jawaban itu ke dalam kategori – kategori yang jumlahnya lebih terbatas. Pengklasifikasian perangkat kategori itu penyusunannya harus memenuhi : bahwa

setiap perangkat kategori dibuat dengan mendasarkan kriterium yang tunggal, bahwa setiap perangkat kategori harus dibuat lengkap, sehingga tidak ada satu jawaban responden yang mendapat tempat, dan bahwa kategori yang satu harus terpisah secara jelas tidak saling tumpang tindih. Sehingga dalam analisis data tersebut hanya terfokus pada penerapan Qanun nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya di wilayah hukum Kota Subulussalam.

4. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini menggunakan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2007.

F. Sistematika Tugas Akhir

BAB I : Merupakan Pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang Masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, rewiw kajian terdahulu tujuan dan manfaat penulisan skripsi dan metode pembahasan.

BAB II : Dalam Bab ini dibahas tentang Kajian Teoritis seputar pemberlakuan Syariat Islam di Aceh, Sejarah Syariat Islam di Aceh, Syariah dan Pendekatan Qanun Aceh dan Kewajiban Menegakkan Syariat Islam.

BAB III : Dalam Bab ini dibahas mengenai Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya yang meliputi tempat dan tanggal Pengesahan, Pengertian Khamar, Ruang Lingkup Pelanggaran Minuman Khamar Sanksi pelaksanaan uqubat.

BAB IV : Pada Bab ini dibahas mengenai analisis tentang Problematika Penerapan Qanun Nomor 12 Tahun 2003 di Kota Subulussalam. Peran Dinas Syariat Islam dan Wilayatul Hisbah Kota Subulussalam dalam mengawal Qanun Nomor 12 Tahun 2003, peran masyarakat dan sarana/fasilitas.

BAB V : Kesimpulan dan Saran Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan yang diperoleh dari serta Saran- hasil penelitian saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

SYARIAT ISLAM DI ACEH

A. Sejarah Syariat Islam di Aceh

Ada banyak sekali penelitian terhadap sejarah hukum Islam yang sangat rumit di Aceh, tetapi versi yang disederhanakan adalah sebagai berikut. Sejak abad ketujuhbelas hingga ke masa pembentukan pengawasan administratif oleh pemerintahan penjajah Belanda pada abad kesembilanbelas akhir, pengadilan formal dilaksanakan oleh hakim Islam (*qadi*), yg diangkat oleh sultan dan pejabat-pejabat lain.¹² Sama seperti di belahan negeri Muslim lainnya, hukum yang berlaku merupakan campuran dari Syari'at dan adat yang bervariasi dari satu tempat ke tempat lain.

Dengan kedatangan penjajah Belanda, sistem menggunakan para qadi yang diangkat secara lokal terus dipakai, namun wewenang mereka secara bertahap dikurangi, dan pada waktu itu secara formal tidak ada pengadilan agama atau setidaknya tak ada pengadilan agama yang diakui oleh pemerintahan koloni. Peradilan pidana berada dibawah wewenang pengadilan kolonial, dan Belanda berusaha untuk memindahkan penanganan kasus-kasus lain seperti persoalan tanah dan warisan, menjadi tanggung jawab dewan adat.¹³

¹² Al-Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Dinas Syariat Islam (Aceh, 2005), h. 84.

¹³ Daniel Lev, *Islamic Courts in Indonesia* (1985), hal. 10; Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh* (2003), h. 48.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) merupakan upaya pemerintah dalam rangka merebut kembali kepercayaan rakyat guna penyelesaian konflik di Aceh. Memang dalam perjalanan panjang masyarakat Aceh, keberadaan Islam menjadi sendi kehidupan yang tidak dapat dipisahkan.¹⁴

Usaha menerapkan Syari'at Islam terus dilakukan oleh masyarakatnya melalui berbagai upaya. Ini menunjukkan bahwa terdapat desakan yang begitu kuat yang muncul dari arus bawah (masyarakat) agar pemerintah memberikan keluasaan bagi masyarakat Aceh menjalankan Syari'at Islam secara kaffah. Perjalanan Syari'at Islam di Aceh setelah kemerdekaan RI mengalami pasang surut. Perubahan dan perkembangan kondisi sosial dan politik Negara Republik Indonesia turut menjadi penentu tentang penyelenggaraan Syari'at Islam di Aceh.

Pada masa awal kemerdekaan upaya pelaksanaan Syari'at Islam dilakukan dengan pembentukan lembaga peradilan yang mandiri dan berkuasa penuh. Karena tuntutan yang terus menerus maka Gubernur Sumatera melalui surat kawat Nomor: 189 tanggal 13 Januari 1947 memberi izin kepada Residen Aceh membentuk Pengadilan Agama (*Mahkamah Syar'iyah*) dengan kewenangan yang penuh (tidak membutuhkan pengukuhan dari Pengadilan Negeri) dan relatif lebih luas di bidang

¹⁴ Muhammad, Rusjdi Ali, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh: Problem, Solusi, dan Implementasi*, Banda Aceh- Jakarta: Kerja sama Ar-Raniry Press dan Logos Wacana Ilmu, 2003, h. 45.

hukum keluarga yang meliputi nafkah, kekayaan bersama, hak pemeliharaan anak, disamping perceraian dan pengesahan perkawinan dan kewarisan.

Tahap baru pelaksanaan Syariat Islam di Aceh terjadi pada tahun 1959. Pada tahun ini-seperti telah disinggung di atas-terjadi kesepakatan antara Dewan Revolusi DI/TII dengan Wakil Pemerintah Pusat (populer dengan sebutan Missi Hardi) untuk mengakhiri "Peristiwa Aceh", dan untuk ini dibuatlah Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959. Dengan keputusan ini Provinsi Aceh mendapat sebutan baru: Daerah Istimewa Aceh. Sebutan ini mengandung makna pemberian "... *otonomi yang seluas-luasnya, terutama dalam lapangan keagamaan, peradatan, dan pendidikan.*" Namun, Keputusan Perdana Menteri ini cenderung tidak efektif di lapangan karena Pemerintah Pusat tidak mengeluarkan peraturan pelaksanaannya.¹⁵

Pada tahun 1965 disahkan undang-undang tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (UU Nomor 18 tahun 1965), tetapi kehadiran undang-undang ini tidak banyak bermanfaat bagi Daerah Istimewa Aceh karena tidak memberi makna khusus tentang status keistimewaan Aceh. Undang-undang ini menyamakan otonomi yang diberikan kepada semua daerah Indonesia lainnya, sehingga hampir tidak ada arti dari keistimewaan itu selain dari sekedar sebutan dan pengakuan tentang aspek historis istilah saja.

¹⁵ Hardi, *Daerah Istimewa Aceh, Latar Belakang Politik dan Masa Depan*, h.181.

Pada masa Orde Baru, undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah diganti dengan Undang-Undang Pemerintahan di Daerah, yaitu UU Nomor 5 tahun 1974. Dalam undang-undang ini status keistimewaan Aceh menjadi lebih tragis lagi karena sama sekali tidak dijelaskan. Masalah keistimewaan Aceh hanya disinggung sedikit di dalam penjelasan pasal 93, yang intinya istilah Daerah Istimewa hanyalah sekedar sebutan bagi Provinsi Aceh. Sedang mengenai otonomi yang luas di bidang agama, pendidikan, dan peradatan yang diakui dalam Keputusan Perdana Menteri di atas, sudah ditiadakan, dan tidak disebut-sebut lagi di dalam undang-undang baru. Otonomi yang akan diberikan kepada Aceh adalah sama dengan yang akan diberikan kepada daerah lain, disesuaikan dengan keadaan nyata di lapangan.¹⁶ Dengan aturan ini, sekiranya dibandingkan dengan yang diperoleh beberapa daerah lain maka otonomi di Aceh bisa jadi akan lebih sempit, karena disesuaikan dengan keadaan nyata di lapangan.

Namun begitu, di dalam perjalanan sejarahnya Pemerintah Daerah Istimewa Aceh tetap berusaha mengisi keistimewaan Aceh dengan berbagai Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur, atau instruksi Gubernur.

Dari rangkaian peraturan yang dikeluarkan Gubernur atau Pemerintah Daerah ini, ada sebuah Peraturan Daerah yang tidak disahkan oleh Pemerintah Pusat, yaitu *rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Daerah*

¹⁶ Al Yasa' Abu Bakar, *Pelaksanaan Syari'at Islam*, dalam *Syari'at di Wilayah Syari'at : Pernik-Pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, h.39.

Istimewa Aceh. Rancangan ini disahkan DPRD pada tahun 1966 dan diajukan kepada Pemerintah Pusat ketika Menteri Dalam Negeri dijabat Basuki Rahmat. Tetapi sebelum peraturan ini disahkan, Basuki Rahmat meninggal dunia dan jabatan Menteri Dalam Negeri digantikan Amir Mahmud. Beliau menolak menyetujui peraturan ini dengan alasan yang tidak jelas. Penolakan tidak diberikan secara resmi dan tertulis, tetapi hanya secara lisan dalam sebuah upacara makan malam di kediaman beliau sendiri, dihadapan beberapa orang tokoh Aceh yang diundang khusus untuk itu, antara lain Gubernur Aceh berikut Ketua dan Wakil Ketua DPRD Aceh.

Kekecewaan masyarakat Aceh sebagaimana disebutkan di atas agaknya mulai terobati ketika tanggal 4 Oktober 1999, Presiden BJ Habibie menandatangani UU Nomor 44 tahun 1999,¹⁷ tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh yang meliputi bidang agama, adat, pendidikan, dan peranan ulama. Penyelenggara kehidupan beragama di daerah ini diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Syari'at Islam bagi pemeluknya. Syari'at Islam didefinisikan dengan tuntunan ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupan.

Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 di atas merupakan peluang yuridis formal untuk menerapkan Syari'at Islam sesuai yang diinginkan masyarakat Aceh, sejak bumi Iskandar Muda diganggu Belanda itu.

¹⁷ Al Yasa' Abu Bakar, *Pelaksanaan Syari'at Islam*, dalam *Syari'at di Wilayah Syari'at : Pernik-Pernik Islam di Nagroe Aceh Darussalam*, h.42 dan 50.

Sementara itu pada tanggal 9 Agustus 2001, Presiden Megawati Soekarno Putri menandatangani UU Nomor 18 Tahun 2001, yang lebih dikenal dengan UU Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam. Terlepas dari plus minus nya UU tersebut, yang terpenting mengenai penerapan Syariat Islam adalah membenarkan pembentukan Mahkamah Syar'iyah, baik pada tingkat rendah (Sagoe) ataupun tingkat tinggi (Nanggroe) yang wewenangnya dapat meliputi seluruh bidang syari'at yang berkaitan dengan peradilan. Kedudukan peradilan tersebut sama dengan tiga saudaranya yang lain, yaitu, Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Administarsi Negara, yang pembinaan yudisialnya dilakukan oleh Mahkamah Agung.¹⁸

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Nangroe Aceh Darussalam membuka peluang bagi berlakunya hukum Islam di Nangroe Aceh Darussalam dalam kerangka Negara kesatuan. Landasan Koseptual pemberian otonomi kepada provinsi Nangroe Aceh Darussalam didasarkan kepada pertimbangan sejarah panjang keberadaan masyarakat Aceh sebagai komunitas muslim yang selama ini dipandang mampu mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih demokratis, egaliter dan menjaga keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi. Sebagai cermin dari semboyan masyarakat Aceh, yakni *Adat bak po Temunrenhoin, hukum bak Syah Kuala, Qonun bak Putro Phang, rensam bak Laksamana* (adat dari sultan, hukum dari ulama, qonun dari putra phang, rensam dari laksamana). Semboyan ini masih

¹⁸ Muslim Ibrahim, *Sejarah Syari'at Islam*, h. 36.

aktual dalam perspektif modern kehidupan berbangsa dan bernegara dan relevan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁹

Kekhususan implementasi UU No. 18 Tahun 2001 ini yakni pemberian kesempatan yang lebih luas kepada Aceh untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, baik sumber ekonomi, sumber daya alam, maupun sumber daya manusia menumbuhkan prakarsa, kreativitas, dan demokrasi sesuai dengan tata nilai yang berkembang di masyarakat Aceh dengan menerapkan Syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat.

UU No. 18 Tahun 2001, sebenarnya merupakan penegasan terhadap UU sebelumnya, yaitu UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang memberikan kewenangan kepada Aceh untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah yang di dasarkan pada Syariat Islam.²⁰

Semangat *spiritualitas* dalam menegakan hukum Islam (syari'at Islam Di Aceh juga tidak terlepas dari teori-teori eksistensi hukum yang sudah diberlakukan sejak zaman penjajah belanda, yaitu *teori Receptio In complexu* yang pada waktu itu dikeluarkan oleh snouck hurgronje yang mengatakan bahwa bagi setiap penduduk

¹⁹ Yusril Ihza Mahendra, *Mewujudkan Supermasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Setjen Depkeh dan HAM, 2002. h. 142.

²⁰ Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, Jawa Timur: Banyu Media cetakan Pertama 2005, h. 225-227.

berlaku hukum agamanya masing-masing, bagi orang Islam berlaku hukum agama Islam, demikian juga yang lain.²¹

Berbagai cara sudah ditempuh pemerintah untuk mendamaikan Aceh dan melepaskannya dari konflik, namun hasilnya belum menunjukkan tanda-tanda berakhirnya. Presiden Habibie telah mencoba mengadakan pendekatan dan menarik simpati masyarakat Aceh dengan berbagai program pembangunan dan kemanusiaan. Demikian juga pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, tetapi konflik terus saja berlangsung, bahkan intensitasnya lebih meningkat daripada sebelumnya, karena GAM sendiri terus melakukan konsolidasi. Konsekuensinya sulit memprediksi masa depan Aceh, bahkan dalam masa pemerintahan Presiden Megawati juga seperti itu. Bagi Indonesia mengizinkan Aceh mengadakan referendum dengan opsi merdeka, dapat menyebabkan pemisahan diri Aceh dari Republik Indonesia. Belajar dari pengalaman Timor Timur, hampir semua rakyat Indonesia percaya bahwa mayoritas masyarakat Aceh akan memilih merdeka dari Indonesia, jika referendum diadakan. Karena Aceh, secara historis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari republik ini, bahkan sumbangannya yang cukup besar terutama di awal kemerdekaan, maka sulit kiranya Pemerintah Pusat melepaskannya. Setelah gagalnya Kesepakatan Penghentian Permusuhan (*COHA/ Cessation of Hostilities Agreement*) sejak awal

²¹Suparman Ustman. 2001. *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama. h. 111.

2003, Pemerintah Pusat akhirnya menerapkan Operasi Militer Terpadu dengan Pemerintah Darurat Militer di Aceh pada 19 Mei 2003 yang lalu.²²

Pada era Presiden Susilo Bambang Yudoyono (sejak 2004 hingga kini 2008) kondisi Aceh sempat berstatus sebagai Darurat Sipil. Setelah terjadinya musibah 26 Desember 2004 (Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami) Pemerintah Pusat masih mengupayakan pertemuan dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka) yang dilakukan Finlandia pada tanggal 15 Agustus 2005. Pada waktu itu terdapatlah Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah RI dan GAM, untuk sama-sama membuat lembaran baru di Aceh. Puncak dari kesepakatan itu adalah lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam undang-undang ini diatur banyak hal yang menyangkut sistem pemerintahan di Aceh, yang tentunya masih dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikianlah gambaran beberapa gejolak politik yang terdapat dalam sejarah Aceh untuk mendesakkan pemberlakuan Syari'at Islam di bumi Serambi Mekah tersebut.

B. Syariat Islam Suatu keharusan Untuk Aceh

Sejarah panjang keberadaan masyarakat Aceh di bumi Nusantara, memperlihatkan mampu menata masyarakat yang unik dan egaliter dan berkeeseimbangan dalam menyiapkan kehidupan duniawi dan ukhrawi. Sebuah semboyan kehidupan bermasyarakat telah menjadi pegangan umum yakni "*Adat bak*

²² Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam*, h. xxiv-xxv.

Po Teumeureuhom; hukom bak Syiah Kuala; Qanun bak Putro Phang; Reusam bak Laksamana" (adat dari Sultan, hukum dari Ulama, Qanun dari Putri Pahang, reusam dari Laksamana).

Semboyan ini masih dapat diartikulasikan dalam perspektif modern dalam bernegara dan mengatur pemerintahan yang demokratis dan bertanggung jawab. Tatahan kehidupan yang demikian itu, sangat memungkinkan untuk dilestarikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Dengan berlandaskan kepada dasar hukum dan nilai sejarah di atas, maka untuk Provinsi Daerah Istimewa Aceh dipandang perlu untuk mendapatkan kesempatan menyelenggarakan pemerintahan daerah dalam bentuk otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang ini disebut "*Undang-undang tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*". Undang-undang ini pada prinsipnya mengatur kewenangan pemerintahan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang merupakan kekhususan dari kewenangan pemerintahan daerah, selain sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Kewenangan yang berkaitan dengan bidang pertahanan negara merupakan kewenangan Pemerintah. Dalam hal pelaksanaan kebijakan tata ruang pertahanan

untuk kepentingan pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang tidak bersifat rahasia, Pemerintah berkoordinasi dengan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Hal mendasar dari undang-undang ini adalah pemberian kesempatan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri termasuk sumber-sumber ekonomi, menggali dan memberdayakan sumber daya alam dan sumber daya manusia, menumbuhkembangkan prakarsa, kreativitas dan demokrasi, meningkatkan peran serta masyarakat, menggali dan mengimplementasikan tata bermasyarakat yang sesuai dengan nilai luhur kehidupan masyarakat Aceh, memfungsikan secara optimal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam memajukan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan mengaplikasikan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat.

Untuk melaksanakan berbagai kewenangan dalam rangka kekhususan, Pemerintah membuka peluang untuk meningkatkan penerimaan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam termasuk kemungkinan tambahan penerimaan selain yang telah diatur dalam undang-undang ini.

Undang-undang ini menempatkan titik berat otonomi khusus pada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang pelaksanaannya diletakkan pada daerah kabupaten dan kota atau nama lain secara proporsional. Kekhususan ini merupakan peluang yang berharga untuk melakukan penyesuaian struktur, susunan, pembentukan dan penamaan pemerintahan di tingkat lebih bawah yang sesuai dengan jiwa dan

semangat berbangsa dan bernegara yang hidup dalam nilai-nilai luhur masyarakat Aceh, diatur dalam Peraturan Daerah yang disebut dengan Qanun.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain dengan mengikuti asas *lex specialis derogat lex generalis* dan Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materiil terhadap Qanun. Dalam hal pemberian otonomi khusus sebagaimana dimaksud undang-undang ini, Pemerintah berkewajiban memfasilitasi dan mengoptimalkan perannya dalam rangka percepatan pelaksanaan otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.²³

A. Syariah dan Pendekatan Qanun Aceh

Dalam Islam, Syariah (cara atau jalan) sering diartikan sebagai seperangkat standar yang mengatur semua aspek kehidupan, dari kepatuhan agama, perbankan, hingga tingkah laku sosial yang selayaknya, yang pada intinya bersumber dari Quran, kitab utama agama Islam, dan hadits, kumpulan peribahasa dan penjelasan tentang sunah, atau teladan dan aturan normatif, dari Nabi Muhammad. Tetapi, tidak ada penafsiran tunggal atas Syariah di antara umat Muslim di seluruh dunia: terdapat berbagai perbedaan dalam penafsiran para ahli Islam tentang teladan kenabian yang mana yang asli dan keabsahan atau kelayakan menerapkan ayat-ayat tertentu secara harafiah di era modern ini. Pada awal tahun 1999, Pemerintah Indonesia dan Aceh

²³ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134, *Bagaian Umum Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001*.

mengadopsi pendekatan penerapan Syariah yang menekankan pada tanggung jawab negara untuk menjamin bahwa semua orang memenuhi kewajiban agamanya yang berasal dari Islam.²⁴

Paska dikeluarkannya UU No. 44 Tahun 1999, Gubernur Aceh mulai mengeluarkan peraturan-peraturan berbasis Syariah tentang berbagai isu, termasuk busana Muslim, alkohol, dan judi.²⁵ Peraturan-peraturan ini tidak dijalankan oleh Pemerintah Provinsi,²⁶ tetapi sejak bulan April 1999, muncul berbagai laporan yang mengatakan bahwa beberapa kelompok laki-laki di Aceh menegakkan peraturan ini secara main hakim sendiri melalui “razia jilbab,” yang menasar pada perempuan-perempuan yang tidak mengenakan jilbab, melakukan pelecehan verbal, menggunting rambut atau pakaian mereka, dan melakukan aksi kekerasan lain terhadap mereka.²⁷ Frekuensi terjadinya kejadian-kejadian semacam ini maupun penyerangan-penyerangan lainnya terhadap individu-individu yang dianggap melanggar prinsip-

²⁴ Islam di Aceh didominasi oleh aliran *Sunni (Sunnah wal Jamaah)*, dan khususnya mengikuti *mahzabShafi'i* (salah satu dari empat (4) *mahzab*/aliran *fiqh* utama; lainnya adalah *Hanafi, Hanbali dan Maliki*).

²⁵ Keputusan Gubernur No.451.1/21249 (disahkan pada tanggal 6 September 1999, mulai berlaku sejak 23 September 1999) (memerintahkan semua perempuanpegawai pemerintahan mengenakan busana Islami).Miller, h. 54

²⁶ International Crisis Group, *Aceh: Can Autonomy Stem the Conflict?* [Aceh: Dapatkan Otonomi Membendung Konflik?], ICG Asia Report No. 18, 27 Juni 2001, h. 10. Lihat juga Perda No. 5/2000 tentang Pelaksanaan Syariah Islam. Tampaknya Perda ini tidak diberlakukan karena kurangnya dana.*Ibid.*

²⁷ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), *Peta Kekerasan: Pengalaman Perempuan Indonesia* (Jakarta: 2002), hlm. 239 (mengutip laporan pada tahun 2000 tentang perempuan yang menjadi korban kekerasan “razia jilbab” yang dilakukan oleh sekelompok pemuda yang menggunting rambut mereka, menyirami mereka dengan cat, dan melakukan pelecehan seksual kepada mereka).

prinsip Syariah tampaknya meningkat paska dikeluarkannya UU No. 44/1999 dan peraturan-peraturan Gubernur terkait Syariah.²⁸

Paska pengesahan UU Otonomi Khusus pada tahun 2001, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengesahkan serangkaian qanun (“peraturan daerah,” terminologi Arab yang digunakan untuk memberi ciri khas bagi semua peraturan daerah yang disahkan di Aceh, tidak hanya terbatas pada peraturan yang terkait dengan Syariah) yang mengatur tentang pelaksanaan Syariah. Lima (5) qanun disahkan antara tahun 2002-2004 yang berisi hukuman pidana atas pelanggaran Syariah: Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang penerapan Syariah dalam aspek “kepercayaan (aqidah), ritual (ibadah), dan penyebaran (syiar) Islam,” yang meliputi persyaratan busana Islami; Qanun No. 12 Tahun 2003 melarang konsumsi dan penjualan alkohol; Qanun No. 13 Tahun 2003 melarang perjudian; Qanun No. 14 Tahun 2003 melarang “perbuatan bersunyi-sunyian”; dan Qanun No. 7 Tahun 2004 tentang pembayaran zakat.

Aturan-aturan tersebut mencakup sejumlah ketentuan yang membedakannya dari hukum pidana yang diterapkan di tempat lain di Indonesia. Kecuali perjudian, tidak ada tindak pidana semacam ini yang dilarang di luar Aceh. Tanggung jawab penegakan qanun terletak pada Kepolisian Nasional dan pasukan polisi khusus Syariah yang hanya terdapat di Aceh, atau yang dikenal sebagai Wilayatul Hisbah (WH, “Pihak Berwenang Syariah”). Semua qanun mengatur penalti, meliputi denda,

²⁸ Miller, h. 55.

hukuman penjara, dan cambuk, sebuah bentuk penghukuman yang tidak dikenal di sebagian besar daerah di Indonesia.²⁹

C. Kewajiban Menegakkan Syariat Islam

Semanagat masyarakat untuk menerapkan Syariat Islam di Indonesia berkolerasi dengan prosese perjalanan sejarah, tradisi cultural, semangat untuk *kaffah* dalam Islam dan juga di dorong keinginan untuk memperbaiki keterpurukan hukum selama ini. Hukum Indonesia yang saat ini berlaku sudah tidak dapat dipungkiri adalah sebuah proses imperialisme sekuleristik.

Hukum yang hidup melalui tranpalantasi dari pemikiran-pemikiran barat telah diterima begitu saja oleh bangsa ini tanpa penyaringan terlebih dahulu. Ini sangat memperhatikan, ketidak berdayaan masyarakat Indonesia diperlihatkan melalui begitu banyaknya fasilitas Barat dalam berbagai bentuk dan menyangkut kebutuhan dasar dari masyarakat Indonesia. Kita memang berdiam dalam wilayah negara dengan nama Indonesia, namun kita bukan tuan rumah di dalam rumah sendiri.³⁰

Syariah Islam bagi ummat Islam diumpamakan seperti manusia dan nyawanya, Muhammad Syaltut³¹ menjelaskan bahwa Islam merupakan ajaran yang sempurna yang meliputi keyakinan sekaligus sistem hukum, oleh karena itu

²⁹ QanunNo. 14/2003 tentang “perbuatan bersunyi-sunyian” mengizinkan pemberlakuan hukuman cambuk antara 3-9 kali, dan/atau denda antara Rp 2,5-10 juta. Pasal 22(1). Cambuk juga diizinkan sebagai hukuman bagi kejahatan-kejahatan seperti perzinahan dan perjudian di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, walaupun sepertinya hukuman ini belum sering diterapkan. Andi Hajramurni, “Makassar’s ‘sharia’ bylaws see a decline in enforcement effort [Penurunan Upaya Penegakan Perda Syariah Makassar],” *The Jakarta Post*, 31 Agustus 2010.

³⁰ H.R Otje Salman Soemandiningrat, Anton F Susanto, *Menyikapi dan Memaknai syariat Islam Secara Global dan Nasional*, Bandung: Refika Aditama, 2004, h.77.

³¹ Busman Edyar, dalam tulisan di Media Indonesia, tanggal 27 Juli 2001 berjudul “Sosialisasi dan transformasi Syariat Islam”.

mengamalkan ajaran merupakan hal yang tidak dapat di tawar lagi, artinya seorang muslim tidak memiliki pilihan lain untuk melaksanakan Syariat Islam dalam kehidupannya sebagai mana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 208.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.

Lebih jauh dan secara tegas Sayyid Qutub dalam Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an, "Mengikuti atau melaksanakan hukum Jahiliyah yang di buat manusia , konsekuensinya bila tidak melaksanakan hukum Allah (*Hukum Islam*) adalah termasuk orang yang *zalim, fasik* dan *kafir*".³²

Terdapat perselisihan pandangan tidak hanya dengan orang non Muslim tapi juga antara Muslim dengan Muslim yang akibatnya gagasan penerapan Syariat Islam dalam tataran tertentu mengalami kemandulan. Paling tidak ada tiga kecenderungan/pandangan atau sikap ummat Islam terhadap penerapan Syariat Islam yaitu:³³

1. Kelompok *skriptualis* yang menginginkan hukum Islam diformalkan sebagaimana tertulis dalam teks Al-Qur'an dan Sunnah (bagi pandangan ini

³² Lihat QS. 5: 44, 45, 47.

³³ H.R Otje Salman Soemandiningrat, *Menyikapi dan Memaknai syariat Islam Secara Global dan Nasional*, h. 78.

hukum *Qishas*, *Potong Tangan*, *Rajam* dan Trem lainnya seperti *muamalah* dan *al-ahwal-syakhsiyah*)

2. Kelompok *Subtantilatis* yang berpandangan penerapan hukum Islam tidak meski persis dengan apa yang disebutkan dalam teks Al-Qur'an dan Sunnah, *Qishas*, *Rajam* dan *Potong Tangan* hanyalah alternatif bagi terciptanya keadilan dan kepastian hukum di masa awal kemunculan Islam. Alasan *Maqasid al-Syariah* (tujuan diterapkannya hukum Islam) bisa terlaksana, maka sah-sah saja hukum yang lain diterapkan, misalnya hukuman penjara bisa menjadi pengganti hukuman potong tangan.
3. Kelompok *Sekuleris* yang menginginkan Islam hanyalah sebagai keyakinan saja, maka urusan selain itu (dalam hal ini hukum Islam teidak relevan dimunculkan sebagai hukum alternatif).

Menyikapi persoalan di atas dengan memandang pendapat para ulama Jumhur, “Al-Qur'an memberikan kemudahan kepada manusia untuk menjalankan perintah Allah, karena sesungguhnya Allah tidak akan memberi beban dimana manusia tidak sanggup memikulnya, namun tidak di perkenankan mencari-cari kemudahan dalam beribadah kepada Allah”. Sejauh ini pandangan *Subtansialis* memiliki alasan mengapa mereka berpandangan demikian, paling tidak dasar bahwa Qur'an harus dibaca secara kritis adalah alasan utama mereka, bahwa ada kecenderungan dengan apa yang di istilahkan “*Islam Amerika*” lahir dari kalangan

ini, karena kebanyakan dari mereka adalah kaum moderen dalam Islam yang cenderung terbaratkan dan menjadi/sedikit sekuleris.³⁴

Tidak di pungkiri bahwa penegakan Syariat Islam harus disertai perubahan mendasar di berbagai aspek kehidupan masyarakat, artinya penegakan Syariat Islam secara otomatis harus di sertai perubahan lain sebagai pendukung terciptanya tujuan tersebut. Paling tidak ada dua cara dalam mewujudkan tujuan di atas tersebut yaitu, *pertama*, melalui perombakan yang revolusioner yaitu melaui/dimulai perombakan moral kepemimpinan melalui gerakan dan mobilisasi massa/pengerahan massa secara besar-besaran untuk merombak sistem dengan sasaran utama menetapkan seorang pemimpin yang memiliki kualitas moral dan tingkat kesalehan yang teruji sehingga dapat memimpin bangsa ini kejalan yang lebih baik. *Kedua*, menegakkan Syariat Islam melalui kegiatan sistematis dan bertahap yaitu mencoba mengembangkan bidang-bidang tertentu di masyarakat, untuk selanjutnya dilakukan proses Islamisasi di berbagai lapangan hukum, proses ini termasuk usaha untuk menciptakan sistem pendidikan yang Islami.³⁵

³⁴ H.R Otje Salman Soemandiningrat, *Menyikapi dan Memaknai syariat Islam Secara Global dan Nasional*, h. 80.

³⁵ H.R Otje Salman Soemandiningrat, *Menyikapi dan Memaknai syariat Islam Secara Global dan Nasional*, h.84.

BAB III
QANUN NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG MINUMAN KHAMAR
DAN SEJENISNYA

A. Tempat, tanggal disahkan dan isi Qanun Nomor 12 Tahun 2003

Qanun Nomor 12 Tahun 2003 disahkan di Banda Aceh pada tanggal 15 Juli 2003 yang bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Awal 1424 Hijriyah*. Qanun Nomor 12 Tahun 2003 kemudian di undangkan di Banda Aceh sehari setelah di sahkan yaitu pada tanggal 16 Juli 2003 M/16 *Jumadil Awal 1424 H* dengan tempat pengundangan pada Lembaran Daerah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Tahun 2003 dengan Nomor 25 Seri D Nomor 12 yang di tandatangani oleh Gubernur NAD Abdullah Puteh dan Sekretaris Daerah Provinsi NAD yaitu Thanthawi Ishak. Qanun Nomor 12 Tahun 2003 terdiri dari 10 bab dan 39 pasal dengan rincian sebagai berikut³⁶:

Bab I Ketentuan Umum yang meliputi pasal 1, angka 1 sampai angka 28.

Bab II Ruang Lingkup dan Tujuan yang terdiri dari pasal 2 dan 3.

Bab III Larangan dan Pencegahan yang terdiri dari pasal 4 – 9.

Bab IV Peran Masyarakat yang terdiri dari pasal 10 – 14.

Bab V Pengawasan dan Pembinaan yang meliputi pasal 16 – 18.

Bab VI Penyidikan dan Penuntutan yang meliputi pasal 19 - 25.

³⁶ Alyasa Abu Bakar, *Syariat Islam di NAD Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, h . 252.

Bab VII Ketentuan Uqubat yang meliputi pasal 26 - 30.

Bab VIII Pelaksanaan Uqubat yang meliputi pasal 31 – 35.

Bab IX Ketentuan Peralihan yang meliputi pasal 36 – 37.

Bab X Ketentuan Penutup yang meliputi pasal 38 - 39.

B. Pengertian Khamar Menurut Qanun Nomor 12 Tahun 2003

Dalam BAB I Ketentuan umum angka 20 disebutkan bahwa *Khamar* dan Sejenisnya adalah minuman yang memabukkan apabila dikonsumsi dapat menyebabkan gangguan kesehatan, kesadaran dan daya pikir.

Di dalam penjelasan Qanun Nomor 12 Tahun 2003 disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan sejenisnya adalah minuman yang mempunyai sifat atau kebiasaan memabukkan atas dasar kesamaan *illat* (sebab) yaitu memabukkan seperti bir, brendi, wiski, tuak dan sebagainya.

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Pelarangan Minuman Khamar dan Sejenisnya

1. Ruang Lingkup Pelarangan Minuman Khamar dan Sejenisnya

Ruang lingkup larangan minuman khamar dan sejenisnya dijelaskan dalam Bab II Pasal 2 yaitu, segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan segala minuman yang memabukkan. Hal ini diperjelas lagi dalam ketentuan umum pada Bab I Qanun Nomor Tahun 2003 yaitu:

a. Memproduksi

Yaitu serangkaian kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk menjadi minuman *Khamar* dan Sejenisnya.

b. Mengedarkan

Yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran minuman *Khamar* dan Sejenisnya kepada perorangan dan/atau masyarakat.

c. Mengangkut

Yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan membawa minuman *Khamar* dan Sejenisnya dari suatu tempat ke tempat lain dengan kendaraan atau tanpa menggunakan kendaraan.

d. Memasukkan

Yaitu, setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan membawa minuman *Khamar* dan Sejenisnya dari daerah atau negara lain ke dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

e. Memperdagangkan

Yaitu, setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penawaran, penjualan atau memasarkan minuman *Khamar* dan Sejenisnya.

f. Menyimpan

Yaitu, menempatkan *Khamar* dan Sejenisnya di gudang, hotel, penginapan, losmen, wisma, bar, restoran, warung kopi, rumah makan, kedai, kios dan tempat-tempat lain. Menimbun adalah mengumpulkan minuman khamar dan sejenisnya di gudang, hotel, penginapan, losmen, wisma, bar, restoran, warung kopi, rumah makan, kedai, kios dan tempat-tempat lain.

g. Mengkonsumsi

Yaitu, memakan atau meminum minuman *Khamar* dan Sejenisnya baik dilakukan sendiri maupun dengan bantuan orang lain.

2. Tujuan Pelarangan Minuman Khamar dan Sejenisnya

Qanun Nomor 12 Tahun 2003 di undangkan guna untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk penyelewengan terhadap ketentuan-ketentuan syariat, adapun tujuan pelarangan minuman Khamar dan sejenisnya dijelaskan dalampasal 3 sebagai berikut :

- a. Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk tindakan dan/atau perbuatan yang dapat merusak akal.
- b. Mencegah terjadinya perbuatan atau kegiatan yang timbul akibat minuman *khamar* dalam masyarakat.
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan minuman *khamar* dan sejenisnya.

D. Sanksi Terhadap Pelanggar Qanun Nomor 12 Tahun 2003

Dalam Pasal 26 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 12 tahun 2003 dijelaskan bahwa:³⁷

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, diancam dengan *`uqubat hudud* 40 (empat puluh) kali cambuk.

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah Pemeluk agama Islam yang *mukallaf* di Nanggroe Aceh Darussalam.³⁸

2. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai Pasal 8 diancam dengan *`uqubat ta`zir* berupa kurungan paling lama 1 (satu) tahun, paling singkat 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), paling sedikit Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang ada di Nanggroe Aceh Darussalam.

3. Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah *jarimah hudud*. Jarimah hudud adalah tindak pidana yang kadar dan jenis *`uqubatnya* terikat pada ketentuan Al-Quran dan Al-Hadits.

³⁷ Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, No 12 Tahun 2003 Tentang *Minuman Khamar dan Sejenisnya*.

³⁸ Penjelasan atas Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, No 12 Tahun 2003 Tentang *Minuman Khamar dan Sejenisnya*. Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, No. 28.

4. Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai Pasal 8 adalah *jarimah ta'zir*. Jarimah ta'zir adalah tindak pidana yang tidak termasuk qishash-diat dan hudud yang kadar dan jenis 'uqubatnya diserahkan kepada pertimbangan hakim.

E. Jarimah Khamar dan Sejenisnya Serta Uqubatnya³⁹

NO	BENTUK JARIMAH	PELAKUNYA	UQUBATNYA	KETERANGAN
1	Mengonsumsi/ meminum	Orang/perorangan	Dicambuk : 40 Kali	Hukuman <i>hudud</i>
2	Memproduksi	- Perorangan - Badan hukum - Badan Usaha	Kurungan : - Maksimal : 1 tahun - Minimal : 3 bulan Dan/atau denda: - Maksimal Rp. 75.000.000 - Minimal Rp. 25.000.000	- Hukuman <i>ta'zir</i> - Bila pelakunya Badan Usaha, maka dapat dicabut/dibatalkan izin usahanya (hukuman administratif)
3	Menyediakan	S d a	S d a	S d a
4	Menjual	S d a	S d a	S d a
5	Memasukkan	S d a	S d a	S d a
6	Mengedarkan	S d a	S d a	S d a
7	Mengangkut	S d a	S d a	S d a
8	Menyimpan	S d a	S d a	S d a

³⁹ Armia Ibrahim, *Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pelaksanaan syariat islam di Aceh*, h. 26.

9	Menimbun	S d a	S d a	S d a
10	Memperdagangk an	S d a	S d a	S d a
11	Menghadiahkan	S d a	S d a	S d a
12	Mempromosikan	S d a	S d a	S d a
13	Melegalisasi penyediaan Khamar	Instansi yang berwenang mengeluarkan izin usaha	S d a	S d a
14	Mengulangi pelanggaran	Orang, badan Hukum atau Badan Usaha	Ditambah 1/3 dari ‘uqubat maksimal	S d a

Dari tabel diatas terlihat bahwa orang yang mengkonsumsi minuman khamar dan sejenisnya akan dijatuhi hukuman *hudud*, berupa cambuk sebanyak 40 kali. Di dalam fiqih, *hudud* adalah jenis hukuman yang pasti, yang mempunyai hanya satu bentuk dan satu jenis hukuman.⁴⁰

Setiap orang yang terbukti melakukan kesalahan (perbuatan pidana) tersebut semuanya dijatuhi hukuman yang sama, yang dalam kasus mengkonsumsi minuman khamar adalah dicambuk 40 kali. Hakim tidak diberi izin untuk memilih (besar kecil atau tinggi rendah) hukuman atau menjatuhkan hukuman lain. Sedangkan bagi mereka yang memproduksi dan mengedarkannya, baik dengan cara menyimpan, menjual dan sebagainya dijatuhi hukuman ta’zir, yaitu kurungan paling lama satu

⁴⁰ Al Yasa’ Abu Bakar, *Syariat Islam di Nangroe Aceh Darussalam, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2005, Edisi Ketiga, h. 259.

tahun dan paling sedikit tiga bulan, dan atau denda paling banyak Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling sedikit Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Karena merupakan hukuman *ta'zir*, maka peraturan boleh menentukan limit tertinggi dan terendahnya dan dapat menentukan alternatif antara kurungan dan denda, tetapi dapat juga berupa hukuman kumulatif, gabungan antara kurungan dan denda.⁴¹

Hakim diberikan hak untuk memilih diantara berbagai kemungkinan yang disediakan oleh qanun tersebut. Sekiranya perbuatan pidana yang berkaitan dengan khamar ini dilakukan oleh badan hukum, maka hukuman akan dijatuhkan kepada penanggungjawabnya. Begitu juga badan usaha yang terbukti melakukan pelanggaran ini dapat dijatuhkan hukuman administratif berupa pencabutan atau pembatalan izin usaha.

Hal lain yang perlu diperhatikan, dalam pasal 29 diatur ketentuan mengenai penambahan hukuman maksimal, bagi mereka yang mengulangi pelanggaran. Sesuai dengan ketentuan mengenai perbedaan perbuatan pidana hudud dengan perbuatan pidana *ta'zir*, maka penambahan hukuman ini hanya berlaku untuk *ta'zir* dan tidak untuk *hudud*. Kesimpulan ini antara lain dikukuhkan oleh pernyataan dalam qanun sendiri, bahwa penambahan sampai batas sepertiga tersebut dilakukan atas hukuman maksimal. Penggunaan istilah maksimal disini secara tidak langsung menunjukkan bahwa penambahan itu hanya untuk pidana *ta'zir*, karena hukuman maksimal dan

⁴¹ Al Yasa' Abu Bakar, *Syariat Islam di Nangroe Aceh Darussalam, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, h. 259.

minimal hanya ada pada *ta'zir*, sedangkan pada *hudud* hanya satu hukuman, tidak ada maksimal dan minimal.⁴²

F. Pelaksanaan Uqubat Qanun Nomor 12 Tahun 2003

Uqubat cambuk dilakukan oleh seorang petugas yang ditunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam melaksanakan tugasnya, Jaksa Penuntut Umum harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Qanun ini dan/atau ketentuan yang akan diatur dalam Qanun tentang hukum formil.⁴³

Pelaksanaan '*uqubat* dilakukan segera setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap. Penundaan pelaksanaan '*uqubat* hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan dari Kepala Kejaksaan apabila terdapat hal-hal yang membahayakan terhukum setelah mendapat keterangan dokter yang berwenang.⁴⁴

Uqubat cambuk dilakukan di tempat yang dapat disaksikan orang banyak dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan dokter yang ditunjuk; Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter 0,75 s/d 1(satu) senti meter, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda/belah. Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka, leher, dada dan kemaluan. Kadar pukulan atau cambukan tidak sampai melukai. Terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat, dan memakai baju tipis yang menutup aurat.

⁴² Al Yasa' Abu Bakar, *Syariat Islam di Nangroe Aceh Darussalam, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, h. 260.

⁴³ Pasal 31 ayat 1 dan 2 *Qanun Nomor 12 Tahun 2003*.

⁴⁴ Pasal 32 ayat 1 dan 2 *Qanun Nomor 12 Tahun 2003*.

Sedangkan perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain di atasnya. Pencambukan terhadap perempuan hamil dilakukan setelah 60 (enam puluh) hari yang bersangkutan melahirkan.⁴⁵

Apabila selama pencambukan timbul hal-hal yang membahayakan terhukum berdasarkan pendapat dokter yang ditunjuk, maka sisa cambukan ditunda sampai dengan waktu yang memungkinkan.⁴⁶ Pelaksanaan *'uqubat* kurungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 26 dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.⁴⁷

G. Tugas dan Fungsi Mahkamah Syar'iah dalam Menjalankan Peradilan di Aceh

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam menetapkan bahwa peradilan syariat di NAD akan dijalankan oleh sebuah lembaga dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah.⁴⁸

Dalam melaksanakan kewenangannya Mahkamah Syar'iyah akan melaksanakan kewenangan yang tadinya dilaksanakan oleh Pengadilan Agama, dengan demikian perkara yang tadinya diselesaikan oleh Pengadilan Agama, sekarang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah. Pengakuan pemberian kewenangan kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menjalankan syariat juga diatur

⁴⁵ Pasal 33 ayat 1-6 *Qanun Nomor 12 Tahun 2003*.

⁴⁶ Pasal 34 *Qanun Nomor 12 Tahun 2003*.

⁴⁷ Pasal 36 *Qanun Nomor 12 Tahun 2003*.

⁴⁸ Ainal Hadi, *Hukum dan Fenomena Sosial*, Aceh Justice Resource Centre, h. 128.

dalam Pasal 128 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan: “*Mahkamah Syar’iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.*” Adapun tugas dan fungsi dari Mahkamah Syar’iyah meliputi tugas dan fungsi di bidang justisial dan bidang non justisial.

Di bidang justisial Mahkamah Syar’iyah mempunyai tugas untuk menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara antar orang Islam di bidang *al-ahwal al-syakhsyah* (hukum keluarga), muamalah (perdata) dan jinayah (pidana) Pasal 49 Qanun No 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam. Perkara bidang *al-ahwal al-syakhsyah* meliputi masalah perkawinan, kewarisan dan wasiat⁴⁹. Bidang muamalah antaranya meliputi masalah jual beli, utang-piutang, *qiradh* (permodalan), bagi hasil, pinjam meminjam, perkongsian, wakilah, penyitaan, gadai, sewa menyewa, perburuhan. Untuk perkara *jinayah* termasuk perbuatan yang dapat diancam dengan jenis hukuman *hudud*, *qishas*, dan *ta’zir*. Di bidang jinayah kita telah mempunyai tiga *qanun jinayah* yaitu:

1. Qanun No 12 Tahun 2003 tentang Minuman *Khamar* dan sejenisnya.
2. Qanun No 13 Tahun 2003 tentang *Maisir* (perjudian).
3. Qanun No 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat* (mesum).

Pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang non yustisial meliputi pengawasan terhadap jalannya Mahkamah Syar’iyah (Pasal 52 Qanun No 10 Tahun 2002). Mahkamah Syar’iyah juga mempunyai tugas memberikan istbat kesaksian rukyat

⁴⁹ Ainal Hadi, *Hukum dan Fenomena Sosial*.h. 129.

hilal dalam penentuan awal bulan pada bulan tahun Hijriah (Pasal 52 A, UU No 3 Tahun 2006). Selain itu, menyaksikan pengangkatan gubernur/wakil gubernur, dan bupati/wakil bupati serta memberi nasehat dan pertimbangan hukum bagi lembaga pemerintahan yang memerlukan (bila diminta).

Tugas pokok pengadilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman adalah menerima, memeriksa, serta mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili ditentukan oleh kewenangan mengadili dari setiap pengadilan tersebut, baik itu menyangkut dengan kewenangan mengadili secara absolute maupun relatif.

Setiap badan peradilan yang ada di Indonesia mempunyai batas kewenangan masing-masing dalam mengadili, begitu halnya untuk Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam Pasal 128 ayat (2) UU Pemerintahan Aceh disebutkan Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh. Pasal ini mengandung dua asas yaitu asas personalitas keislaman dan asas teritorial yang akhirnya melahirkan empat pedoman dalam memperlakukan Hukum Syar'iyah yaitu⁵⁰:

1. Untuk masyarakat muslim NAD yang melakukan tindak pidana di NAD secara otomatis Hukum Islam (*qanun*) diperlakukan bagi mereka.
2. Untuk masyarakat muslim lainnya (masyarakat muslim bukan Aceh) yang melakukan tindak pidana di NAD tetap diberlakukan Hukum Islam.

⁵⁰ Ainal Hadi, *Hukum dan Fenomena Sosial*, h.130

3. Untuk masyarakat NAD non muslim yang melakukan tindak pidana di NAD ataupun di luar NAD tidak diperlakukan Hukum Islam sama sekali.
4. Untuk masyarakat muslim NAD yang melakukan tindak pidana di NAD juga tidak diberlakukan Hukum Islam.

Lebih lanjut untuk melihat Kewenangan mengadili MS harus dilihat Pasal 3 ayat (1) UU No 11 Tahun 2003 menyebutkan:

“Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar’iyah dan Mahkamah Syar’iyah Propinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan pengadilan Tinggi Agama, ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam ibadah dan syiar Islam yang ditetapkan dalam qanun”.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar’iyah di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : KMA/070/SK/X/2004 mengatur melimpahkan sebagian kewenangan Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar’iyah dalam perkara-perkara muamalat dan jinayah yang ditetapkan dalam *qanun* Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hanya saja untuk perkara muamalat belum ada qanun yang mengatur, sehingga perkara muamalat yang diselesaikan di Mahkamah Syar’iyah sampai hari ini lebih kepada perkara-perkara yang tadinya merupakan kewenangan peradilan Agama.⁵¹

⁵¹Ainal Hadi, *Hukum dan Fenomena Sosial*,h.130

H. Wilayatul Hisbah Sebagai Penegak Utama Hukum yang Bernuans Syariah di Aceh

Wilayatul Hisbah (yang selanjutnya disebut WH) merupakan perangkat yang memiliki tugas dan kewajiban untuk mengawal dan mengontrol pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Keberadaannya diatur dengan qanun serta keputusan gubernur yang telah memberikan wewenang penuh kepada aparaturnya penegak syariat ini untuk melaksanakan seluruh proses pengawalan secara penuh dan tanpa ragu ragu.⁵²

Gubernur, Bupati/Walikota dan Camat di Aceh, sebagaimana entitas⁵³ administratif lainnya di Indonesia, dapat membentuk Satpol PP untuk menegakkan peraturan terkait dengan “ketertiban publik dan ketentraman masyarakat.”⁵⁴ UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU PA) secara khusus memberi wewenang kepada Pemerintah Daerah Aceh untuk membentuk unit WH yang bertanggung jawab menerapkan hukum Syariah sebagai bagian dari Satpol PP.⁵⁵ Petugas-petugas Satpol PP lainnya sesekali mengadakan patroli dan operasi bersama dengan rekan-rekannya di WH.

⁵² <http://arsipkorankita.blogspot.com/2010/04/mahasiswa-nilai-pengawasan-syariat.html> (diakses pada tanggal 10 Mei 2011).

⁵³ *Entitas (Entity)* adalah Suatu obyek atau konsep yang dibuat modelnya dalam pembangunan basis data.

⁵⁴ *Undang-undang No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh*, Pasal 244(1). Sejumlah pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia telah membentuk Satpol PP. Mereka terpisah dari Kepolisian dan diberdayakan untuk menegakkan peraturan-peraturan administratif terkait ketertiban dan keamanan publik dan biasanya diberdayakan untuk mengumpulkan pajak daerah dan untuk menegakkan ketertiban publik setempat.

⁵⁵ *Undang-undang No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh*, Pasal 244(2). Walaupun pasukan WH Aceh awalnya dibentuk di bawah otoritas Dinas Syariah Islam, WH kemudian disatukan dengan Satpol PP.

Semua petugas WH memiliki wewenang untuk “menegur dan menasihati, memperingatkan, dan memberikan bimbingan moral” kepada orang-orang yang mereka curigai melanggar hukum Syariah di Aceh, memberitahu pihak berwenang yang sesuai tentang kemungkinan adanya pelanggaran hukum Syariah, dan memfasilitasi penyelesaian pelanggaran Syariah melalui tata cara atau hukum adat. Petugas WH yang telah diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memiliki wewenang tambahan, yaitu menangkap dan menahan orang-orang yang dituduh melakukan pelanggaran Syariah tertentu, hingga 24 jam dan mengadakan penyelidikan seperti layaknya polisi atas dugaan pelanggaran Syariah, termasuk mendapatkan testimoni dari saksi mata dan memerintahkan pemeriksaan medis.⁵⁶

Keputusan Gubernur No. 1 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja *Wilayatul Hisbah*, yang secara resmi membentuk WH, mengatur peran WH sebagai sumber panduan dan nasihat *spiritual* bagi masyarakat Aceh.⁵⁷ Qanun Nomor 12 Tahun 2003 yang mengatur tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya, memberikan wewenang kepada WH untuk memberi peringatan dan pembinaan terlebih dahulu kepada pelaku sebelum menyerahkan laporannya kepada penyidik.⁵⁸

⁵⁶ Human Rights Watch, Menegakkan Moralitas, *Pelanggaran dalam Penerapan Syariah di Aceh, Indonesia*. <http://www.hrw.org/fr/node/94464/section/6> (diakses pada tanggal 10 Mei 2011).

⁵⁷ Meliputi memberitahu publik tentang *qanun* yang terkait dengan hukum Syariah; mengawasi kepatuhan atas hukum Syariah; menegur, memperingatkan dan memberikan bimbingan moral kepada mereka yang disangka melanggar hukum Syariah; berusaha menghentikan tindakan/perilaku yang dicurigai melanggar hukum Syariah; menangani pelanggaran-pelanggaran melalui proses adat; dan menyerahkan pelanggaran hukum Syariah kepada penyelidik pidana. UNDP Indonesia, “Akses terhadap Keadilan di Aceh,” h. 48-50.

⁵⁸ Pasal 17 ayat 2 Qanun Nomor 12 Tahun 2003 *Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya*.

Perda ini tidak memberikan wewenang kepada petugas WH untuk menangkap tersangka, melainkan menyerahkan mereka kepada Kepolisian Daerah (Polda) atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) jika perilaku mereka tidak berubah.⁵⁹

⁵⁹ Qanun Nomor 12 Tahun 2003 ,Pasal 17 ayat 3.

BAB IV
PENERAPAN QANUN NOMOR 12 TAHUN 2003 DI WILAYAH HUKUM
KOTA SUBULUSSALAM

Penegakan hukum (*law enforcement*) yang dapat dilakukan dengan baik dan efektif merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu negara dalam upaya mengangkat harkat dan martabat bangsanya dibidang hukum terutama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warganya. Hal ini berarti pula adanya jaminan kepastian hukum bagi rakyat, sehingga rakyat merasa aman dan terlindungi hak-haknya dalam menjalani kehidupannya. Sebaliknya, penegakan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya merupakan indikator bahwa negara yang bersangkutan belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum kepada warganya.⁶⁰

Mengingat begitu pentingnya penegakan hukum tersebut, dalam sekripsi ini akan diuraikan tentang beberapa pilar yang menopang agar hukum dapat ditegakkan secara *efektif*, problematika dan faktor-faktor yang mempengaruhinya khususnya dalam penegakan Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman *Khamar* dan Sejenisnya di Kota Subulussalam.

Bila membicarakan *efektivitas* hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat

⁶⁰ Bambang Sutyiso, *Aktualisasi Hukum Dalam Era Reformasi*. Rajawali Pers, Jakarta, 2004, h. 58.

untuk taat terhadap hukum. *Efektivitas* hukum dimaksud, berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlakunya secara *yuridis*, berlaku secara *sosiologis*, dan berlaku secara *filosofis*. Oleh karena itu, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu (1) kaidah hukum/peraturan itu sendiri; (2) petugas/penegak hukum; (3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum; (4) kesadaran masyarakat.⁶¹ Hal inilah yang penulis uraikan secara berurut sebagai berikut:

A. Kaidah Hukum

Didalam teori-teori ilmu hukum, dapat dibedakan tiga macam hal, mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal ini akan diungkapkan sebagai berikut:

1. Kaidah hukum berlaku secara *yuridis*, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
2. Kaidah hukum berlaku secara *filosofis*, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi
3. Kaidah hukum berlaku secara *sosiologis*, apabila kaidah tersebut efektif . Artinya, kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakatnya (teori kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.

⁶¹ Jainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h. 62.

1. Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya secara yuridis.

Setelah lahirnya Undang-undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Undang-undang No. 18 tahun 2001), dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam yang telah menjadi kewajibannya, Pemerintah Daerah telah menetapkan pula beberapa Qanun yang berkait dengan pelaksanaan Syariat Islam, yang diantaranya adalah Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman *Khamar* dan Sejenisnya.

Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang *Khamar* (minuman keras dan sejenisnya), secara substantif tidak memiliki kontradiksi dengan produk perundang-undangan lainnya. Penyebutan produk perundang-undangan lain dalam konsideran qanun ini menunjukkan bahwa qanun tersebut secara materil melandaskan diri pada produk undang-undang tersebut. Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1997 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol di Daerah, dilihat dari sudut

Pendelegasian kewenangan penyusunan perundang-undangan, telah mengkonfirmasi bahwa Qanun Khamar tidak mengalami kontradiksi dengan undang-undang lainnya. Secara umum, materi muatan Qanun Khamar sama persis dengan isi Keppres di atas.

Perbedaan yang paling prinsip terletak pada lingkup larangannya. Keppres No. 3 Tahun 1997 menyebutkan bahwa memproduksi dan mengedarkan dan mengkonsumsi masih diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Larangan mengkonsumsi juga tidak berlaku di tempat-tempat khusus, seperti hotel, bar, dan lain sebagainya. Keppres hanya tegas melarang memperjualbelikan minuman beralkohol kepada siapa saja yang masih berusia di bawah dua puluh lima tahun.⁶²

Hal itu berarti, sebenarnya tidak ada larangan meminum alkohol, sejauh mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan. Sementara Qanun Khamar, secara tegas melarang kepada siapa saja (subyek hukum qanun, umat Islam yang berdomisili di Provinsi NAD) untuk meminum minuman beralkohol. Tidak hanya mengkonsumsi, badan hukum atau badan usaha juga dilarang memproduksi, menyediakan, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan, menghadiahkan dan mempromosikan minuman Khamar dan Sejenisnya.⁶³

Larangan secara total yang diatur oleh Qanun Khamar juga dibenarkan oleh Keppres No. 3 Tahun 1997 itu. Di dalam Keppres disebutkan bahwa secara implisit penggunaan minuman beralkohol sepenuhnya diserahkan kepada pengaturan dan izin yang diberikan oleh Gubernur atau Bupati.

⁶² Pasal 5 Keppres No. 3 Tahun 1997 “*Dilarang mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) kepada yang belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun*”.

⁶³ Pasal 4-6 *Qanun Khamar No. 12 Tahun 2003*.

Dengan demikian, sekali lagi, larangan minuman beralkohol di NAD, sebagai produk politik di tingkat lokal, memiliki *justifikasi yuridis* dan tidak bertentangan dengan produk perundang-undangan di atasnya.⁶⁴

2. Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya secara filosofis.

Kehidupan *religius* rakyat Aceh dan semangat nasionalisme dalam mempertahankan kemerdekaan merupakan kontribusi yang besar dalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat Aceh juga menjunjung tinggi adat dan menempatkan ulama pada peran yang terhormat dalam kehidupan masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, penyelenggaraan pemerintahan daerah memerlukan adanya jaminan kepastian hukum dalam melaksanakan segala urusan daerah.⁶⁵ Oleh karena itu, dibentuklah UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang menjadi landasan hukum yang kuat bagi keistimewaan Aceh.

Perkembangan yang terjadi di tahun 2001 semakin memperkuat keberadaan UU No. 44 Tahun 1999, yaitu dengan diundangkannya UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Hal mendasar dari UU

⁶⁴ *Kertas Kebijakan Materi Dialog Kebijakan Komnas Perempuan tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*, Draft III/10 Oktober 2005, h. 4.

⁶⁵ *Konsiderans dalam Dasar “Menimbang” UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.*

No. 18 Tahun 2001 adalah pemberian kesempatan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri termasuk sumber-sumber ekonomi, menggali dan memberdayakan sumber daya alam dan sumber daya manusia, menumbuhkembangkan prakarsa, kreativitas dan demokrasi, meningkatkan peran serta masyarakat, menggali dan mengimplementasikan tata bermasyarakat yang sesuai dengan nilai luhur kehidupan masyarakat Aceh, memfungsikan secara optimal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NAD dalam memajukan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi NAD dan mengaplikasikan Syariat

Islam dalam kehidupan bermasyarakat.⁶⁶ Selanjutnya, UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dibentuk sebagai pengganti UU No. 18 Tahun 2001 dan hasil kesepakatan damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, yang dikenal dengan *Memorandum of Understanding (MOU)* Helsinki. Salah satu aspek yang menjadi bagian dari kerangka otonomi khusus di Aceh adalah pemberlakuan Syariat Islam sesuai dengan tradisi dan norma yang hidup dalam masyarakat Aceh. Pasal 126 UU No. 11 Tahun 2006 menegaskan kewajiban setiap pemeluk agama Islam yang berada di Aceh untuk menaati dan mengamalkan Syari'at Islam, sedangkan bagi orang non Islam yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan Syari'at Islam.

⁶⁶ Penjelasan Umum UU No. 18 Tahun 2001 *tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*.

Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi ibadah, *ahwal alsyakhshiyah* (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), *jinayah* (hukum pidana), *qadha'* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), dakwah, syi'ar, dan pembelaan Islam (Pasal 125 UU No. 11 Tahun 2006).

3. Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya secara sosiologis.

Nangroe Aceh Darussalam saat ini merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang memperoleh kesempatan melaksanakan Syariat Islam. Masyarakat Aceh telah melaksanakan Syari'at Islam dalam hidup keseharian, hidup kemasyarakatan, dan hidup ketatanegaraan sejak masa kesultanan dahulu, sebelum dijajah oleh Pemerintah Belanda (yang mulai menyerang Aceh pada tahun 1873), yaitu Sultan Sri Ratu Safiatuddin (memerintah tahun 1641 – 1675) dan Sultan Alaidin Johansyah (memerintah tahun 1735 – 1760).⁶⁷ Di era reformasi, semangat dan keinginan rakyat Aceh untuk melaksanakan Syari'at Islam bergema kembali, di samping tuntutan referendum yang juga disuarakan oleh sebagian generasi muda pada waktu itu. Para ulama dan cendekiawan muslim semakin intensif menuntut Pemerintah Pusat, agar dalam mengisi keistimewaan Aceh dapat diizinkan untuk melaksanakan Syari'at Islam dalam segala aspek kehidupan.

⁶⁷ Al Yasa' Abubakar, *Sekilas Syari'at Islam di Aceh*, Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, hal. 2-3.

Masyarakat Aceh mempunyai latar belakang sejarah yang cukup panjang dalam menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya. Masyarakat Aceh amat tunduk kepada ajaran Islam dan mereka taat serta memperhatikan fatwa ulama, karena ulamalah yang menjadi ahli waris Nabi. Penghayatan terhadap ajaran agama Islam dalam jangka yang panjang itu melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat. Adat itu lahir dari renungan para ulama, kemudian dipraktekkan, dikembangkan, dan dilestarikan, lalu disimpulkan menjadi “*Adat bak Poteumeureuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana*” yang artinya “Hukum adat di tengah pemerintah dan hukum syari’at ada di tangan ulama”.⁶⁸ Ungkapan ini merupakan pencerminan dari perwujudan Syari’at Islam dalam praktek hidup sehari-hari bagi masyarakat Aceh. Aceh kemudian dikenal sebagai Serambi Mekkah, karena dari wilayah inilah kaum muslimin dari wilayah lain berangkat ke tanah suci Mekkah untuk menunaikan rukum Islam yang kelima.⁶⁹

B. Penegak Hukum

Aparatur penegak hukum merupakan faktor kunci, karena dipundak merekalah terutama penegakan hukum diletakkan dalam praktik. Oleh karena itu,

⁶⁸ Penjelasan Umum UU No. 44 Tahun 1999.

⁶⁹ Penjelasan Umum Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2000 tentang *Pelaksanaan Syari’at Islam*.

keberhasilan dan kegagalan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas penegak hukum, apakah penegak hukum itu profesional atau tidak.

Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah dan bawah. Artinya, di dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogyanya harus memiliki suatu pedoman, diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya.

Penegakan hukum atas qanun-qanun di NAD sudah dimulai sejak Juli 2004. Kepolisian Nasional diberi wewenang untuk menegakkan semua hukum di Aceh, termasuk peraturan-peraturan di tingkat provinsi dan kabupaten, tetapi penegak utama hukum pidana bernuansa Syariah di Aceh adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), khususnya *Wilayatul Hisbah*. Akan tetapi, warga sipil juga berperan langsung dalam menegakkan Perda-perda bernuansa Syariah, peranan yang secara jelas ditetapkan dalam Perda-perda tersebut.

Peran Wilayatul Hisbah Dan Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam Dalam Menegakkan Qanun Nomor 12 Tahun 2003

Kasus minuman Khamar merupakan bagian dari penegakan Syariah Islam di Aceh. Asumsi munculnya larangan ini lebih kepada bahwa minuman keras akan merusak jiwa dan raga individu bahkan merusak kehidupan publik. Dalam ketiksadarannya, pelaku ini akan merugikan dan bisa berbahaya, namun kasus minuman keras jarang terlihat. Polisi Syariat lebih banyak menemukannya

bergandengan dengan perjudian dan perbuatan mesum disuatu tempat dalam acara pesta tertentu. Sehingga kasus ini menjadi satu kesatuan.⁷⁰

Penerapan Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya di Kota Subulussalam telah berjalan selama lebih kurang delapan tahun, dimulai sejak Subulussalam masih dalam bagian dari Kabupaten Aceh singkil sampai dengan di bentuknya pemerintahan Kota Subulussalam pada tanggal 2 januari tahun 2007.

Namun dalam prakteknya dilapangan, Qanun Nomor 12 ini belum mampu menjawab dan menyelesaikan semua permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat kota Subulussalam. Sehingga masyarakatpun banyak mempertanyakan fungsi dari keberadaan *Wilayatul Hisbah* dan Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam sebagai instansi yang mengawasi penegakan qanun di kota ini.

Bedasarkan observasi dilapangan yang peneliti lakukan, bahwa salah satu faktor yang menyebabkan tidak efektifnya pemberlakuan Qanun Nomor 12 tahun 2003 di Kota Subulussalam adalah ketidak siapan Dinas Syariat Islam dan WH kota Subulussalam dalam mengemban fungsinya sebagai pengawas dan penegak Qanun di kota ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak ada satupun kasus yang berhasil ditangani pada tahun 2010, padahal tingkat pelanggaran terhadap Qanun Nomor 12 tahun 2003 di kota Subulussalam cukup tinggi.

⁷⁰ Prof. Dr. Masykuri Abdillah, dkk. *Pormalisasi Syari'at Islam di Indonesia, Sebuah Pergulatan yang tak Pernah Tuntas*, h.209

Menurut Tgk, Wilada Sastra S.Sos.I, ketua Rabitah Thaliban Aceh (RTA) cabang Subulussalam dan pemerhati Syariat Islam Kota Subulussalam, menyatakan bahwa WH kurang menjalin kordinasi yang baik dengan pihak Kepolisian, sehingga mereka saling lempar tanggung jawab dan saling menyalahkan dilapangan, seharusnya, WH maupun Kepolisian bekerja sama dalam mengawal penerapan Qanun Nomor 12 dan saling merasa bertanggung jawab.

Selama ini, WH hanya bekerja sendiri dalam memberantas minuman keras walaupun dalam prakteknya setiap WH melakukan razia dilapangan selalu di damping dari pihak kepolisian, namun itu tidak lebih hanya sekedar formalitas saja, karena pada kenyataanya apabila ada pelanggaran terhadap Qanun Nomor 12 ini pihak kepolisian tidak menanggapinya dan berdalih bahwa kami tidak punya wewenang untuk menindaknya.⁷¹ Ditambah lagi WH terkesan terbang pilih dalam menindak pelaku pelanggaran terhadap qanun syariaah di Kota Subulussalam.

Melihat kondisi seperti itu, maka masyarakatpun memiliki keinginan untuk membuat suatu organisasi masyarakat yang tidak ubahnya seperti FPI yang ada dipulau Jawa saat ini, hal ini merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap WH Kota Subulussalam yang tidak bisa diharapkan untuk mengendalikan pelanggaran-pelanggaran qanun syariaah di Subulussalam.

Wilayatul Hisbah adalah penegak hukum yang di bentuk untuk mengawasi penerapan qanun di Aceh, di Subulussalam sendiri WH berada satu

⁷¹ Wilda Sastara, *Ketua RTA dan Pemerhati Syariat Islam Kota Subulussalam*, Wawancara Pribadi di kantor RTA Subulussalam 24 Februari 2011.

naungan dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP). Memang dalam penempatannya tidak harus satu naungan dengan Dinas Syariat Islam, karena hal itu tergantung kepada kebijakan dari pemerintah kabupaten/ kota di Aceh, yang menjadi masalah sekarang ini adalah mengenai perekrutan anggota WH itu sendiri, dimana dalam perekrutannya belum ada standar yang menjadi acuan mengenai kriteria calon anggota WH. Sehingga sering sekali timbul masalah dimana penegak syariat malah melanggar syariat itu sendiri, hal inilah yang menjadi salah satu kendala dalam penegakan Qanun Nomor 12 di Kota Subulussalam.

Minimnya pembekalan dan ditambah dangkalnya pemahaman terhadap Syariat Islam telah membuat anggota WH Subulussalam kurang optimal dalam melaksanakan tugasnya dan bahkan tidak menutup kemungkinan mencoret nama baik WH itu sendiri yang berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat.

Sebenarnya sudah tidak rahasia umum lagi kalau anggota WH juga malah melanggar apa yang seharusnya mereka tegakkan, hal ini dikatakan oleh salah seorang anggota WH kepada peneliti yang tidak mau disebutkan namanya bahwa:

“bagaimana mungkin WH menangkap orang yang minum-minuman keras, sedangkan WH sendiri juga melakukannya.”⁷²

Hal ini menunjukkan bahwa minimnya pengetahuan anggota WH terhadap Syariat itu sendiri, seaharusnya standarisasi perekrutan WH di Subulussalam

⁷² BP. Wawancara pribadi disebuah warung di kecamatan Kampong Lae Mbersih, Penangalan, Kota Subulussalam, 04 Maret 2011.

harus dilakukan, sehingga kedepanya para anggota WH memang benar-benar berkompten dibidangnya sebagai penegak Qanun syariah di Subulussalam.⁷³

Wilayatul Hisbah Kota Subulussalam mempunyai agenda rutin mingguan yaitu Razia setiap dua kali dalam seminggu, hal ini dilakukan guna untuk mengontrol dan menegakkan Qanun Syariaah di Subulussalam, tapi sayang selama tahun 2010 tidak ada satu kasusupun yang berhasil ditangani mengenai pelanggaran terhadap Minuman Khamar dan Sejenisnya.

Berikut ini adalah data pelanggaran qanun Syariah di Subulussalam pada tahun 2010 yang berdasarkan pada jumlah kasus yang berhasil di tangani dan menurut jenis kelamin pelanggarnya.⁷⁴

No	Bulan	Qanun 11/2002	Qanun 12/2003	Qanun 13/2003	Qanun 14/2003	Laki- laki	Perempuan
1	Januari	-	-	-	-	-	-
2	Februari	-	-	1	-	Lk	-
		-	-	-	2	Lk	Pr
3	Maret	-	-	-	1	Lk	Pr
		-	-	-	1	Lk	Pr
4	April	-	-	-	3	Lk	Pr
		-	-	-	2	Lk	Pr
5	Mei	-	-	-	2	Lk	Pr
6	Juni	25	-	-	-	-	Pr
7	Juli	-	-	-	7	Lk	Pr

⁷³ Wilda Sastra, *Wawancara di Kantor RTA* 24 Februari 2011.

⁷⁴ Laporan Rekapitulasi Jumlah Penyelesaian Kasus Jinayat SATPOL PP dan WH Kota Subulussalam.

		-	-	-	1	Lk	Pr
8	Agustus	-	-	-	-	-	-
9	September	-	-	1	-	Lk	-
		-	-	-	2	Lk	Pr

Hal ini bukanlah berarti Subulussalam bersih dari segala bentuk minuman yang memabukkan, hasil survei peneliti ke lapangan menunjukkan bahwa masih banyaknya tingkat pelanggaran terhadap Qanun Nomor 12 Tahun 2003 di Subulussalam. Hal ini dibuktikan dari masih ditemukannya orang-orang yang meminum minuman keras ditempat wisata, mulai dari minuman tradisional seperti Tuak (*Pola* sebutan untuk Tuak bagi masyarakat Subulussalam) sampai dengan minuman dalam bentuk kemasan botol dan kaleng seperti Vodka, Brandy, Anggur, Bir dan lain sebagainya.⁷⁵

Minuman tradisional Pola (Tuak) juga banyak dijumpai di warung-warung kopi dan kolam pancing di Subulussalam, minuman tuak ini adalah hasil dari produksi lokal dan ada juga yang di datangkan dari daerah tetangga yakni Sidikalang Sumatra Utara, sangat disayangkan lagi bahwa minuman tuak ini juga banyak di gemari remaja dan bahkan anak sekolah sekalipun, seperti yang dikatakan oleh Zendri , pemuda kota Subulussalam yang baru saja menyelesaikan studi SMA sebagai berikut:

⁷⁵ Pengamatan di tempat wisata Air Terjun Nan Tampuk Emas dan Cape Kolam Pancing Kampong Lae Mbersih, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, tanggal 15 Februari 2011.

“Disini banyak kok bang anak-anak sekolah setingkat SMA pada minum pola, bahkan saya juga dulu begitu kalau sehabis pulang sekolah kita sering beli pola lalu minum bersama di pinggir kali”⁷⁶

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa banyaknya pelanggaran terhadap Qanun Nomor 12, tapi yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa para penjual itu masih tetap ada, Apa yang membuat mereka tetap bisa menjual minuman Khamar.

Dari hasil wawancara peneliti dengan WH Kota Subulussalam, peneliti mendapatkan jawaban bahwa sebab kenapa para penjual Minuman Khamar dan Sejenisnya tetap ada di Subulussalam dikarenakan para penjual memiliki deking, dimana para WH sendiripun kesulitan untuk memberantasnya, WH tidak bersedia untuk menyebutkan siapa yang menjadi deking bagi para penjual minuman tersebut.

“Setiap kali kami razia pasti yang penjual minuman itu tidak ada, tapi nanti setelah selesai razia pedagang itupun pasti ada lagi, gak tau siapa yang bocorin setiap kali kami razia kepada pedagang itu (Bahrudin padang, anggota WH Kota Subulussalam.”⁷⁷

Disinilah kelemahan para anggota WH, mereka kurang begitu ditakuti oleh para pelanggar-pelanggar qanun, beda halnya seperti anggota dari kepolisian, yang memiliki senjata, terlebih-lebih kalau anggota WH tersebut adalah temanya atau mungkin saudaranya, hal inilah yang membuat susah

⁷⁶ Zendri, *Wawancara Pribadi* tanggal 24 Mei 2011.

⁷⁷ Nurdianti, *Kasubag Tata Usaha WH Kota Subulussalam, Wawancara di kantor WH Kota Subulussalam*, 21 Februari 2011.

menegakkan Qanun syariah khususnya Qanun Nomor 12 tahun 2003 di Kota Subulussalam.

Penegakan Suatu Qanun juga tidak akan bisa berjalan dengan baik apabila minimnya pengawasan terhadap instansi-insatnsi yang terkait dalam hal ini Dinas Syariat Islam dan Wilayatul Hisbah, dalam hal ini Ust.Yusman Afrianto, salah satu tokoh masyarakat dan da'i perbatasan Kota Subulussalam mengatakan bahwa, pengawasan terhadap program kerja Dinas Syariat Islam di Subulussalam sangat kurang dan bahkan boleh dikatakan hampir tidak ada, sehingga hal ini sangat merugikan dan bahkan menjadi beban bagi pemerintah kota Subulussalam, baik dari segi anggaran maupun sosial karena belum menghasilkan perubahan yang positif di tengah-tengah masyarakat.

Pada dasarnya Dinas Syariat Islam bertanggung jawab atas penyelenggaraan Syariat Islam di Subulussalam. Untuk itu, sejatinya Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam harus mampu memainkan peran strategis sebagai lembaga yang berperan mengakomodir dan mensosialisasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan kualitas keislaman di kota ini.

Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam terkesan jalan di tempat dan tak tentu arah, sehingga tidak memberi pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat, saat ini salah satu program dari Dinas Syariat Islam yaitu penempatan para da'i di sejumlah desa yang membutuhkan juga sedang dalaam keadaan tidak berjalan, hal ini disebabkan ketidak jelasan dari pemerintah Kota Subulussalam, karena para da'i yang ada di Subulussalam saat ini adalah da'i dari

Dinas Syariat Islam Provinsi, sehingga mengenai kelanjutannya tergantung kepada permohonan dari pemerintah kabupaten/ kota di Aceh, untuk subulussalam sendiri, pemerintah kota Subulussalam melalui Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam belum memberikan kepastian mengenai keberadaan para da'i tersebut, sedangkan kehadiran para da'i di desa sangat dibutuhkan oleh masyarakat.⁷⁸

Saat ini da'i perbatasan di Subulusslam berjumlah 7 orang dari 12 orang sebelumnya, keberadaan mereka juga tidak menentu terkadang ada di desa tempat mereka bertugas tapi tidak jarang juga mereka pergi dan meninggalkan tempat kerjanya begitu saja, hal ini di sebabkan karena mereka tidak memiliki status yang jelas mengenai pekerjaannya, sehingga merekapun sering pergi guna untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari apa lagi para da'i tersebut sebagian besar juga sudah berumah tangga, sehingga yang terjadi di desa binaanya adalah kepakuman, seperti terhentinya belajar agama anak-anak desa, pengajian remaja, ibu-ibu, dan bapak-bapak, hal ini tentunya akan mempengaruhi terhadap kesuksesan penerapan Syariat Islam itu sendiri.⁷⁹

Penempatan orang yang tidak berkompeten di bidangnya di Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam merupakan salah satu penyebab tidak efektifnya penerapan Qanun-qanun Syariah khususnya Qanun Nomor 12 tahun 2003 di Subulussalam. Hal ini tentu saja menghambat program kerja Dinas Syariat Islam

⁷⁸ Yusman Afrianto, *Wawancara pribadi* pada tanggal 6 maret 2011.

⁷⁹ Yusman Afrianto, *Wawancara pribadi* pada tanggal 6 maret 2011.

itu sendiri, seperti penempatan kepala bidang pembinaan pendidikan dayah, yang dimana orang menangani bidang ini bukanlah orang yang memiliki latar belakang pendidikan sama sekali, sehingga wajar kalau kebanyakan dayah/pesatren di Kota Subulussalam banyak yang kalah bersaing dengan sekolah-sekolah umum dan bahkan ada yang tutup seperti halnya Pondok Pesanten Al-Ikhlas yang berada di Desa Penanggalan, Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam,⁸⁰ sebenarnya jauh sebelumnya Rasulullah SAW juga telah mengingatkan akan bahaya hal itu melalui sabdanya :

Tunggu saat kehancuran, apabila amanat itu disia-siakan. Para sahabat serentak bertanya “ Ya Rasulullah, apa yang dimaksud menyia-nyiakan amanah itu?” Nabi SAW menjawab: “ Apabila suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggu saat kehancuran” (HR. Bukhari)

Penempatan orang yang bukan ahlinya di Dinas Syariat Islam ini juga diakui oleh salah seorang staf di Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam yang menyatakan bahwa keberadaan orang-orang yang seharusnya tidak pantas berada di Dinas Syariat Islam, tapi kenyataannya mereka berada di Dinas Syariat Islam yang menyebabkan Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam cenderung jalan di tempat dan belum bisa memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat saat ini.⁸¹

⁸⁰ Pengamatan lapangan di Kampung Penanggalan pada tanggal 21 Februari 2011.

⁸¹ Karimuddin , *Staf Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam*, Wawancara di Kantor DSI pada tanggal 22 Februari 2001.

Hal diatas sangat disayangkan mengingat harapan masyarakat yang begitu besar terhadap keberadaan Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam untuk dapat memberikan perubahan yang positif di masyarakat.

C. Sarana/Fasilitas

Sarana atau fasilitas amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu, apakah aparat penegak hukum sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana fisik yang memadai, khususnya alat-alat teknologi modern dalam rangka sosialisasi hukum dan mengimbangi kecenderungan-kecenderungan penyimpangan sosial masyarakat, termasuk ketersediaan sarana dan prasarana tempat menjalani pidana dan seterusnya.

Dukungan pemerintah Kota Subulussalam dalam menegakkan Qanun Nomo 12 Tahun 2003 di Kota Subulussalam sangatlah berperan besar guna untuk menunjang keberhasilan penerapan Qanun Nomor 12 ini, karena sampai saat ini kendala yang dihadapi WH dalam menegakkan Qanun Nomor 12 ini dikarenakan keterbatasan dana guna untuk menunjang operasional WH.

Menurut Nurdianti Saputri S.H.I, Kasubag Tata Usaha Wilayatul Hisbah Kota Subulussalam, salah satu kendala yang mereka hadapi untuk mengontrol masyarakat dilapangan adalah keterbatasan dana sedangkan wilayah yang mereka awasi cukuplah luas dengan personil yang terbatas, saat ini anggota WH Kota Subulussalam berjumlah 40 personil dengan satu unit mobil patroli, karena menurut Nurdianti, WH hanya di tempatkan di Kota Subulussalam, beda halnya

dengan kepolisian yang ada di setiap kecamatan, jadi kami harus berpatroli di lima kecamatan di Kota Subulussalam yang kami lakukan minimal dua kali dalam seminggu.⁸²

Berikut ini adalah kekurangan-kekurangan sarana/fasilitas WH Kota Subulussalam;

1. Belum memiliki kantor yang tetap.
2. Belum memiliki Pos di setiap kecamatan.
3. Kekurangan kendaraan patroli.
4. Kekurangan personil WH.

Seharusnya para anggota WH tidak hanya ditempatkan di Kota Subulussalam, penempatan para anggota WH di tingkat kecamatan-kecamatan bahkan sampai ke tingkat pedesaan sebagaimana yang telah dilakukan di kabupaten lainnya di Aceh seperti di Bireun Aceh Utara. Hal ini sangat diperlukan guna untuk mengefektifkan qanun-qanun syariah di Kota Subulussalam, tentunya kerja sama serta perhatian pemerintah sangat dibutuhkan supaya WH Kota Subulussalam dapat bekerja menjadi lebih baik lagi.

D. Warga Masyarakat

Salah satu faktor mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Yang dimaksud disini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Secara

⁸² Nurdianti, *Kasubag Tata Usaha WH Kota Subulussalam, Wawancara di kantor WH Kota Subulussalam*, 21 Februari 2011.

sederhana dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.⁸³

Peningkatan kesadaran hukum warga masyarakat seyogianya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu.⁸⁴

Di Aceh meski penegak utama hukum pidana bernuansa Syariah di Aceh adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), khususnya *Wilayatul Hisbah* (WH),⁸⁵ masyarakat juga diberikan peranan untuk mencegah terjadinya jarimah minuman *Khamar* dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim untuk melakukan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Peranserta masyarakat tersebut tidaklah dalam bentuk main hakim sendiri.

Warga sipil berperan langsung dalam menegakkan Perda-perda bernuansa Syariah, diantaranya adalah peranan yang secara jelas ditetapkan dalam Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman *Khamar* dan Sejenisnya sebagai berikut:

1. Masyarakat berperan serta dalam upaya pemberantasan Minuman *Khamar* dan Sejenisnya. Masyarakat wajib melapor kepada pejabat yang berwenang

⁸³ Jainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, h. 64.

⁸⁴ Jainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, h. 69.

⁸⁵ Human Rights Watch, *Menegakkan Moralitas, Pelanggaran dalam Penerapan Syariah di Aceh, Indonesia*.

baik secara lisan maupun tertulis apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap larangan Minuman *Khamar* dan sejenisnya.⁸⁶

2. Wujud peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah melapor kepada pejabat yang berwenang terdekat, apabila mengetahui adanya perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai Pasal 7.⁸⁷
3. Dalam hal pelaku pelanggaran tertangkap tangan oleh warga masyarakat, maka pelaku beserta barang bukti segera diserahkan kepada pejabat yang berwenang.⁸⁸
4. Pejabat yang berwenang wajib memberikan perlindungan dan jaminan keamanan kepada pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau orang yang menyerahkan pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.⁸⁹
5. Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 apabila lalai dan/atau tidak memberikan perlindungan dan jaminan keamanan dapat dituntut oleh pihak pelapor dan/atau pihak yang menyerahkan tersangka.⁹⁰

Masyarakat Kota Subulussalam pada umumnya belum begitu mengetahui tentang keberadaan Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang minuman Khamar dan Sejenisnya, hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan hukum masyarakat kota

⁸⁶ Pasal 10 ayat 1 dan 2 *Qanun Nomor 12 Tahun 2003*.

⁸⁷ *Qanun Nomor 12 Tahun 2003*, Pasal 11.

⁸⁸ *Qanun Nomor 12 Tahun 2003*, Pasal 12.

⁸⁹ *Qanun Nomor 12 Tahun 2003*, Pasal 13.

⁹⁰ *Qanun Nomor 12 Tahun 2003*, Pasal 14.

subulussalam terhadap qanun ini sangatlah rendah,terlebih-lebih lagi mengenai peran yang diamanahkan qanun ini kepada masyarakat. Karena pada dasarnya pengetahuan hukum masyarakat akan dapat diketahui bila diajukan seperangkat pertanyaan mengenai pengetahuan hukum tertentu. Pertanyaan dimaksud, dijawab oleh masyarakat itu dengan benar sehingga kita dapat mengatakan bahwa masyarakat itu telah mempunyai pengetahuan hukum yang benar.

Minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam kota Subulussalam terhadap qanun ini telah membuat kebanyakan masyarakat kota Subulussalam tidak mengetahui tentang peran mereka dalam mengawal setiap qanun Syariah di Subulussalam, sehingga masyarakat merasa bahwa penegakan Qanun Syariah sepenuhnya menjadi tanggung jawab WH.

Selama ini Dinas Syariat Islam telah melakukan sosialisasi terhadap Qanun Nomor 12 tahun 2003 di Kota Subulussalam, namun hasilnya kurang begitu maksimal, karena sosialisasi hanya dilakukan dalam bentuk seminar-seminar akan bahaya Minuman Keras dan Narkoba di tingkat Kota Subulussalam dan sekolah-sekolah menengah atas, hal ini tentunya membuat masyarakat tidak faham mengenai perannya karena mengingat sebagian besar masyarakat Kota Subulussalam adalah petani yang kesehariannya berada di ladang atau kebun milik mereka.

Seharusnya Dinas Syariat Islam langsung terjun ke masyarakat untuk mensosialisaikan qanun ini, mengingat Kota Subulussalam yang hanya terdiri dari

lima kecamatan dengan jumlah penduduk 60.298 jiwa⁹¹, hal ini tentu sedikit lebih ringan bila dibandingkan dengan daerah kabupaten/kota lainnya di Aceh. Sehingga masyarakat bisa tahu dan tanggap dengan kondisi yang ada, karena selama ini masyarakat juga merasa takut untuk melaporkan suatu pelanggaran kepada yang berwajib, hal ini tentunya akibat dari kurangnya sosialisasi mengenai Qanun Nomor 12 ini, karena dalam pasal 13 Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya telah dijelaskan bahwa “pejabat yang berwenang wajib memberikan perlindungan dan jaminan keamanan kepada pelapor” dengan demikian masyarakat nantinya diharapkan bisa melaporkan setiap pelanggaran kepada pihak yang berwajib tanpa ada rasa takut atau merasa keamanannya terganggu.

Supaya hukum benar-benar dapat mempengaruhi perilaku warga masyarakat, maka hukum itu harus disebarkan seluas mungkin sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu, merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelebagaan hukum.

Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal, yaitu melalui suatu cara terorganisasikan dengan resmi. Disamping itu, ada juga tata cara informal yang tidak resmi sifatnya. Inilah yang merupakan salah satu batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana pengubah dan pengatur perilaku.

⁹¹ http://www.nad.go.id/uploadfiles/PENDUDUK/PENDUDUKBULANJUNI_08.pdf.

Ini semua termasuk apa yang dikatakan *disfusi* yaitu penyebaran dari unsur-unsur kebudayaan tertentu di dalam masyarakat yang bersangkutan.⁹²

Difusi hukum bersangkut paut dengan bagaimana hukum menyebar dalam masyarakat dan kemudian diketahui oleh warganya. Kiranya salah satu alat difusi yang utama adalah penerangan melalui ceramah-ceramah secara berkala ataupun tak berkala. Ceramah-ceramah tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, umpamanya melalui radio atau televise. Selain dari upaya-upaya tersebut, penerangan dapat dilakukan dengan tulisan-tulisan seperti surat kabar, majalah-majalah atau dengan selebaran.⁹³

⁹² Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, h. 136.

⁹³ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, h. 201.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dalam praktik untuk meujudkan penegakan hukum yang efektif memang tidak mudah, karena ternyata banyak faktor yang mempengaruhinya, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Meskipun demikian, untuk menciptakan kondisi penegakan hukum yang efektif bukanlah sesuatu yang tidak mungkin, sepanjang ada kesungguhan dan kerja keras dari semua pihak, baik pemerintah, kalangan swasta maupun masyarakat.

Oleh karena itu, hal yang mendesak untuk segera dilakukan adalah melakukan pembenahan di berbagai sektor, baik dari sistemnya maupun dari faktor sumber daya manusianya, sehingga kinerja dan kualitas penegak hukum kedepan dapat memenuhi harapan masyarakat.

Berdasarkan observasi yang penulis telah lakukan, yaitu setelah data-data terkumpulkan dan dianalisis, maka penulis dapat menyimpulkan bahawa penyebab kurang efektifnya penerapan Qanun Nomor 12 Tahun 2003 di Kota Subulussalam dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Penegakan Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya di Kota Subulussalam pada umumnya belum berjalan dengan baik, hal ini ditandai dengan masih banyak dijumpai di diberbagai tempat di Kota

Subulussalam orang yang mengkonsumsi minuman keras dan ditambah lagi dengan buruknya kinerja para penegak qanun syariah di kota ini.

2. Kurangnya dukungan pemerintah Kota Subulussalam dalam menunjang kinerja para WH di lapangan, sehingga WH kurang efektif dalam melakukan pengawasan dikarenakan keterbatasan dana yang dialami saat ini.
3. Tidak adanya standarisasi dalam perekrutan anggota WH di Kota Subulussalam yang menyebabkan kurangnya pemahaman dan pengetahuan para anggota WH terhadap hukum Syariat itu sendiri dan tidak menutup kemungkinan para penegak Syariat ini malah yang melanggar Syariat.
4. Kurangnya kerja sama antara WH dan pihak Kepolisian serta dengan para tokoh masyarakat di Kota Subulussalam, sehingga hal ini telah membuat saling lempar tanggung jawab dan saling menyalahkan di antara para penegak hukum itu. Kerja sama dengan para tokoh masyarakat dan Alim Ulama di gampong-gampong selama ini belum berjalan dengan baik, seharusnya apabila hal ini lakukan tentu akan membuat para pelaku minuman keras akan merasa segan dan takut bila hendak melakukan jarimah khamar di gampong tersebut, karena pada dasarnya para tokoh masyarakat dan Alim Ulama adalah orang yang paling disegani digampong tersebut.
5. Penempatan orang-orang yang bukan ahlinya di Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam, sehingga membuat kinerja Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam tidak membuahkan hasil yang maksimal sampai saat ini, Dinas Syariat Islam belum memberikan suatu nuansa yang Syariah di Kota

Subulussalam dan terkesan hanya sebagai pelengkap dinas di suatu pemerintahan Kota Subulussalam.

6. Kurangnya sosialisasi terhadap Qanun Nomor 12 Tahun 2003 yang dilakukan Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam.
7. Adanya oknum yang membekingi para penjual minuman Khamar di kota Subulussalam, sehingga para pedagang itupun susah untuk di tangkap dan merasa tidak takut terhadap keberadaan WH di Kota Subulussalam.
8. Minimnya pengawasan terhadap kinerja Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam, sehingga membuat kinerja dinas ini tidak jelas dan tidak terkontrol dan terkesan hanya pemborosan terhadap anggaran daerah Kota Subulussalam.

B. Saran-saran

Sebelum mengakhiri penulisan skripsi ini penulis akan memberikan saran-saran kepada pihak yang terkait sebagai berikut :

1. *Wilayatul Hisbah* Kota Subulussalam harus segera membuat standarisasi dalam perekrutan anggota WH dan memberikan pembekalan yang maksimal kepada anggota WH saat ini. Sehingga anggota WH dapat bertindak yang mencerminkan nilai-nilai Syariah, baik ketika bertugas maupun ketika berda di luar tugas.
2. Untuk menghindari kesalah fahaman diantara para penegak hukum di Kota Subulussalam, *Wilayatul Hisbah* Kota Subulussalam harus menjalin kerja

sama yang baik dengan pihak Kepolisian, karena dengan begitu beban yang ditanggung WH saat ini bisa terbantu dan supaya para oknum yang mendekingi para penjual minuman keras di Subulussalam dapat terungkap.

3. *Wilayatul Hisabah* harus mengawasi keluar masuknya barang ke Kota Subulussalam dengan membuat pos pengawasan di perbatasan Kota Subulussalam dengan Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Dairi Sumatera Utara.
4. Pemerintah Kota Subulussalam harus menempatkan orang-orang yang sesuai dengan keahliannya di Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam, sehingga program kerja Dinas Syariat Islam dapat berjalan sesuai dengan yang di harapkan yaitu membumikan hukum Islam di Kota Subulussalam.
5. Pemerintah Kota Subulussalam harus mengawasi kinerja Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam, sehingga apa yang ditargetnkan dapat tercapai dan tidak terkesan sia-sia.
6. Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam harus mengaktifkan kembali peran para da'i perbatasan di Kota Subulussalam, karena dengan begitu masyarakat Kota Subulussalam dapat memahami tentang ajaran Islam dengan baik sehingga mereka tidak merasa terbebani dengan pemberlakuan Syariat Islam Kota Subulussalam.
7. Masyarakat Kota Subulussalam harus berperan aktif dalam mengawal setiap penerapan Qanun Syariah khususnya Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Kota Subulussalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. *Al-Qur.an dan Terjemah*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur.an. 1984.
- Abdillah, Masykuri. dkk. *Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia, Sebuah Pergulatan yang Tak Pernah Tuntas*. Jakarta : Renaissance, 2005.
- Abu Bakar, Al Yasa. *Syari'at Islam di Propinsi angroe Aceh Darussalam, Paradikma, Kebijakan dan Kegiatan*. Banda Aceh : Dinas Syari'at Islam NAD, 2005.
- .Bungan Rampai Pelaksanaan Syariat Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam)*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam NAD. 2005.
- Agussalim Sitompul, *Usaha-usaha Mendirikan Negara Islam dan Pelaksanaan syariat Islam ddi Indonesia*. Jakarta : Misaka Galiza, 2008.
- Ali Jainuddin. *Sosiologi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafikaa, 2007.
- Asafari, Jaya Bakri. *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut Asy-Syatibi, cetakan pertama* Jakarta : Raja GraPindo Persada. 1996.
- Armia, Ibrahim. *Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pelaksanaan syariatislam di Aceh*.
- Ash-Shiddiqy, Hasby T.M. *Falsafah Hukum Islam*, Yogyakarta : Bulan Bintang 1974.
- Crisis Group Asia Report N°117. *Syari'at Islam dan Peradilan Pidana d Acehi. 31 Juli 2006*.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu. 1997.
- Fahmi, Chairul Dkk. *Hukum dan Fenomena Sosial*, Aceh Justice Resource CentreCetakan Pertama Tahun 2009.
- Faisar, Ananda Arfa. *Filsafat Hukum Islam, cetakan pertama*. Bandung : Cita Pustaka. 2007.
- Human Rights,, Watch. *Menegakkan Moralitas, Pelanggaran dalam Penerapan Syariah di Aceh, Indonesia*. <http://www.hrw.org/fr/node/94464/section/6>

- Ibrahim armia, *Peraturan Perundang-undangan Tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*.
- International Crisis Group, *Aceh: Can Autonomy Stem the Conflict?* [Aceh: Dapatkan Otonomi Membendung Konflik?], ICG Asia Report No. 18, 27 Juni 2001.
- Juhaya, S Praja. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung : Pusat Penerbitan LPPM UI. 1995.
- Ka'bah Rifyal, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Universitas Yasri, 1999.
- Karim,Moh. *Metodologi Penelitian, refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*. Malang. UIN Malang Pers.2008.
- Keputusan Gubernur No. 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Administrasi *Wilayatul Hisbah*.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), *Peta Kekerasan: Pengalaman Perempuan Indonesia*. Jakarta: 2002.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 114, Tambahan Lembaran Negara No. 41.
- Michelle Ann Miller, *Pemberontakan dan Reformasi di Indonesia: Kebijakan Jakarta terkait Keamanan dan Otonomi di Aceh*, 2009.
- Penjelasan atas Qanun Propinsi Nangroe Aceh Darussalam,No 12 Tahun 2003 .
- Qodratillah Meity taqdir. *kamus bahasa indonesia*. Jakarta: pusat bahasa Departemen pendidikan nasional Jakarta, 2008.
- Qanun Propinsi Nangroe Aceh Darussalam,No 12 Tahun 2003 Tentang *Minuman Khamar dan Sejenisnya*.
- Rusjdi Ali Muhammad. *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh Problem, Solusi, dan Implementasi*. Banda Aceh-Jakarta: Kerjasama Ar-Raniry Press dan Logos Wacana Ilmu. 2003.
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial Dirasah Islamiyah III*, Jakarta: Rajawali Pers,1996.
- Soekanto Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada,2003.

Sutiyoso Bambang, *Aktualisasi Hukum Dalam Era Reformasi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2004.

Saidurrahman. *Syarah Syariat di NAD (Sejak Pemerintahan RI sampai lahirnya UU No 11 Tahun 2006)*. Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) Ke – 10, Banjarmasin, 1– 4 November 2010.

Saksono, Gatot. *Dialog Wacana Syariat Islam dan Sumbangan Pikiran Orang Kristiani*. Yogyakarta: Rumah Belajar Yabinkasm 2009.

Sumitro, Warkum. *Perkembangan Hukum Islam di tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*. Jawa Timur: Banyu Media, Cetakan Pertama. 2005.

Soemadiningrat, Otje Salman H.R.Susanti Anton F. *Menyikapi dan memaknai Syariat Islam Secara Global dan Nasional*. Bandung: Refika Aditaman. 2004.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-undang No 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, Sosialisasi Oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil, Tahun 2007.

Undang-undang No. 11 Tahun 2006 *tentang Pemerintahan Aceh. Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya*. Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. No. 28.

Undang-undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Undang-undang No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Daerah Istimewa Aceh

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

<http://arsipkorankita.blogspot.com/2010/04/mahasiswa-nilai-pengawasan-syariat.html>

http://www.nad.go.id/uploadfiles/PENDUDUK/PENDUDUKBULANJUNI_08.pdf.

http://acehpedia.org/Kota_Subulussalam .

<http://id.wikipedia.org/wiki/Subulussalam>.

QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 12 TAHUN 2003

TENTANG
MINUMAN KHAMAR DAN SEJENISNYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa Keistimewaan dan Otonomi Khusus yang diberikan untuk Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, antara lain bertujuan mengaplikasikan Syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, tenteram, adil dan tertib guna mencapai ridha Allah;
 - b. bahwa mengkonsumsi minuman khamar dan sejenisnya merupakan pelanggaran terhadap Syari'at Islam, merusak kesehatan, akal dan kehidupan masyarakat dan berpeluang timbul maksiat lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu membentuk Qanun tentang Larangan Minuman Khamar dan sejenisnya.

- Mengingat :
1. Al-Quran;
 2. Al-Hadits;
 3. Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945
 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 7. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3892);
 8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi vertikal di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Daerah;
16. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
17. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 2 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4);
18. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);

..

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TENTANG MINUMAN KHAMAR DAN SEJENISNYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Gubernur beserta perangkat lainnya sebagai badan eksekutif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota beserta perangkat lain pemerintah Kabupaten/Kota sebagai badan eksekutif Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
6. Camat adalah kepala pemerintahan di kecamatan.
7. Imum Mukim/Kepala Mukim adalah pimpinan dalam suatu kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa gampong.
8. Keuchik adalah Kepala pemerintahan terendah dalam suatu kesatuan masyarakat hukum di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
9. Masyarakat adalah himpunan orang-orang yang berdomisili di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
10. Mahkamah adalah Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
11. Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang bertugas membina, mengawasi dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan amar makruf nahi mungkar.
12. Polisi adalah Polisi Nanggroe Aceh Darussalam yang diberi tugas dan wewenang khusus menangani pelaksanaan penegakan Syari'at Islam.
13. Penyidik adalah Penyidik Umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Gubernur yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan pelanggaran Syari'at Islam.
15. Jaksa adalah Jaksa Nanggroe Aceh Darussalam yang diberi tugas dan wewenang menjalankan tugas khusus di bidang Syari'at Islam;
16. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi tugas dan wewenang khusus untuk melaksanakan penuntutan di bidang Syari'at dan melaksanakan penetapan dan putusan hakim Mahkamah;

17. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Polisi Nanggroe Aceh Darussalam dan/atau pejabat lain di lingkungannya yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Jarimah adalah perbuatan yang diancam dengan 'uqubat qishash-diat, hudud, dan ta'zir.
19. 'Uqubat adalah ancaman 'uqubat terhadap pelanggaran jarimah qishas-diat, hudud dan ta'zir.
20. Khamar dan sejenisnya adalah minuman yang memabukkan, apabila dikonsumsi dapat menyebabkan gangguan kesehatan, kesadaran dan daya pikir.
21. Memproduksi adalah serangkaian kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk menjadi minuman khamar dan sejenisnya.
22. Mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran minuman khamar dan sejenisnya kepada perorangan dan/atau masyarakat.
23. Mengangkut adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan membawa minuman khamar dan sejenisnya dari suatu tempat ke tempat lain dengan kendaraan atau tanpa menggunakan kendaraan.
24. Memasukkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan membawa minuman khamar dan sejenisnya dari daerah atau negara lain ke dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
25. Memperdagangkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penawaran, penjualan atau memasarkan minuman khamar dan sejenisnya.
26. Menyimpan adalah menempatkan khamar dan sejenisnya di gudang, hotel, penginapan, losmen, wisma, bar, restoran, warung kopi, rumah makan, kedai, kios dan tempat-tempat lain.
27. Menimbun adalah mengumpulkan minuman khamar dan sejenisnya di gudang, hotel, penginapan, losmen, wisma, bar, restoran, warung kopi, rumah makan, kedai, kios dan tempat-tempat lain.
28. Mengonsumsi adalah memakan atau meminum minuman khamar dan sejenisnya baik dilakukan sendiri maupun dengan bantuan orang lain.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup larangan minuman khamar dan sejenisnya adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan segala minuman yang memabukkan.

Pasal 3

Tujuan larangan minuman khamar dan sejenisnya ini adalah :

- a. Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang merusak akal;
- b. Mencegah terjadinya perbuatan atau kegiatan yang timbul akibat minuman khamar dalam masyarakat;
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan minuman khamar dan sejenisnya.

BAB III

LARANGAN DAN PENCEGAHAN

Pasal 4

Minuman Khamar dan yang sejenisnya hukumnya haram.

Pasal 5

Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman khamar dan sejenisnya.

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan hukum/badan usaha dilarang memproduksi menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan, menghadiahkan dan mempromosikan minuman khamar dan sejenisnya.
- (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang turut serta/membantu memproduksi, menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan dan memproduksi minuman khamar dan sejenisnya.

Pasal 7

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku juga bagi badan hukum dan atau badan usaha yang dimodali atau mempekerjakan tenaga asing.

Pasal 8

Instansi yang berwenang menerbitkan izin usaha hotel, penginapan, losmen, wisma, bar, restoran, warung kopi, rumah makan, kedai, kios, dan tempat-tempat lain dilarang melegalisasi penyediaan minuman khamar dan sejenisnya.

Pasal 9

Setiap orang atau kelompok/institusi masyarakat berkewajiban

mencegah perbuatan minuman khamar dan sejenisnya.

BAB IV

PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Masyarakat berperan serta dalam upaya pemberantasan minuman khamar dan sejenisnya.
- (2) Masyarakat wajib melapor kepada pejabat yang berwenang baik secara lisan maupun tertulis apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap larangan minuman khamar dan sejenisnya.

Pasal 11

Wujud peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah melapor kepada pejabat yang berwenang terdekat, apabila mengetahui adanya perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai Pasal 7.

Pasal 12

Dalam hal pelaku pelanggaran tertangkap tangan oleh warga masyarakat, maka pelaku beserta barang bukti segera diserahkan kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 13

Pejabat yang berwenang wajib memberikan perlindungan dan jaminan keamanan kepada pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau orang yang menyerahkan pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 14

Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 apabila lalai dan/atau tidak memberikan perlindungan dan jaminan keamanan dapat dituntut oleh pihak pelapor dan/atau pihak yang menyerahkan tersangka.

Pasal 15

Tata cara penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diajukan ke Mahkamah.

BAB V

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 16

- (1) Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Imum Mukim dan Keuchik berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penerapan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sampai Pasal 8.
- (2) Untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan qanun ini, Gubernur, Bupati/Walikota membentuk Wilayatul Hisbah.
- (3) Susunan dan kedudukan Wilayatul Hisbah diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Gubernur setelah mendengar pendapat Majelis Permusyawaratan Ulama setempat.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, Pejabat Wilayatul Hisbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 16 yang mengetahui pelaku pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai Pasal 8, menyampaikan laporan secara tertulis kepada penyidik.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi pembinaannya, Pejabat Wilayatul Hisbah dapat memberi peringatan dan pembinaan terlebih dahulu kepada pelaku sebelum menyerahkan laporannya kepada penyidik.
- (3) Pejabat Wilayatul Hisbah wajib menyampaikan laporan kepada penyidik tentang telah dilakukan peringatan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 18

Wilayatul Hisbah dapat mengajukan gugatan praperadilan kepada Mahkamah apabila laporannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 17 tidak ditindaklanjuti oleh penyidik tanpa suatu alasan yang sah setelah jangka waktu 2 (dua) bulan sejak laporan diterima penyidik.

BAB VI

PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN

Pasal 19

Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran larangan khamar dan sejenisnya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak diatur dalam Qanun ini.

Pasal 20

Penyidik adalah :

- a. pejabat Polisi Nanggroe Aceh Darussalam;
- b. pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus

untuk melakukan penyidikan bidang Syari'at Islam;

Pasal 21

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam huruf a Pasal 20 mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya jarimah khamar;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dirinya;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan jarimah khamar dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya dan Wilayatul Hisbah;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut aturan hukum yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam huruf b Pasal 20 mempunyai wewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berada di bawah koordinasi penyidik umum.
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Pasal 22

Untuk kepentingan penyidikan, Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan (POM) wajib melakukan pemeriksaan dan pengujian kimiawi terhadap minuman atau makanan yang diduga mengandung alkohol atau ethanol atau sejenisnya, yang beredar di kalangan masyarakat atau yang ditemukan oleh penyidik, dalam rangka memperlancar proses penyidikan.

Pasal 23

Setiap penyidik yang mengetahui dan/atau menerima laporan telah terjadi pelanggaran terhadap larangan khamar dan sejenisnya wajib segera melakukan penyidikan.

Pasal 24

Penuntut umum menuntut perkara jarimah khamar dan sejenisnya yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Pasal 25

Penuntut umum mempunyai wewenang :

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik;
- b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. memberi perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke Mahkamah;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut hukum yang berlaku;
- i. melaksanakan putusan dan penetapan hakim.

BAB VII

KETENTUAN 'UQUBAT

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, diancam dengan 'uqubat hudud 40 (empat puluh) kali cambuk.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai Pasal 8 diancam dengan 'uqubat ta'zir berupa kurungan paling lama 1 (satu) tahun, paling singkat 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), paling sedikit Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah jarimah hudud.
- (4) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai Pasal 8 adalah jarimah ta'zir.

Pasal 27

Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 26 merupakan penerimaan Daerah dan disektor langsung ke Kas Baital Mal.

Pasal 28

Terhadap barang-barang/benda-benda yang digunakan dan/atau

diperoleh dari jarimah minuman khamar dirampas untuk Daerah atau dimusnahkan.

Pasal 29

Pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, 'uqubatnya dapat ditambah 1/3 (sepertiga) dari 'uqubat maksimal.

Pasal 30

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai Pasal 8 :

- a. apabila dilakukan oleh badan hukum/badan usaha, maka 'uqubatnya dijatuhkan kepada penanggung jawab;
- b. apabila ada hubungan dengan kegiatan usahanya, maka selain 'uqubat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 26, dapat juga dikenakan 'uqubat administratif dengan mencabut atau membatalkan izin usaha yang telah diberikan.

BAB VIII

PELAKSANAAN 'UQUBAT

Pasal 31

- (1) 'Uqubat cambuk dilakukan oleh seorang petugas yang ditunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Jaksa Penuntut Umum harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Qanun ini dan/atau ketentuan yang akan diatur dalam Qanun tentang hukum formil.

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan 'uqubat dilakukan segera setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Penundaan pelaksanaan 'uqubat hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan dari Kepala Kejaksaan apabila terdapat hal-hal yang membahayakan terhadap hukum setelah mendapat keterangan dokter yang berwenang.

Pasal 33

- (1) 'Uqubat cambuk dilakukan di tempat yang dapat disaksikan orang banyak dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan dokter yang ditunjuk;
- (2) Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter 0,75 s/d 1(satu) senti meter, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda/belah.
- (3) Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka, leher, dada dan kemaluan.

- (4) Kadar pukulan atau cambukan tidak sampai melukai.
- (5) Terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat, dan memakai baju tipis yang menutup aurat. Sedangkan perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain di atasnya.
- (6) Pencambukan terhadap perempuan hamil dilakukan setelah 60 (enam puluh) hari yang bersangkutan melahirkan.

Pasal 34

Apabila selama pencambukan timbul hal-hal yang membahayakan terhukum berdasarkan pendapat dokter yang ditunjuk, maka sisa cambukan ditunda sampai dengan waktu yang memungkinkan.

Pasal 35

Pelaksanaan 'uqubat kurungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 26 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Dengan berlakunya qanun ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 4 Tahun 1999 tentang Larangan Minuman Beralkohol di Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Sebelum adanya hukum acara yang diatur dalam qanun tersendiri, maka hukum acara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya tetap berlaku sepanjang tidak diatur di dalam qanun ini.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Hal-hal yang menyangkut dengan teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 39

Qanun ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Disahkan di Banda Aceh
pada tanggal 15 J u l i 2003
7 Jumadil Awal 1424

GUBERNUR
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

ABDULLAH PUTEH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 16 J u l i
2003

16 Jumadil Awal 1424

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

THANTHAWI ISHAK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2003
NOMOR 25 SERI D NOMOR 12

PENJELASAN

ATAS

QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

NOMOR 12 TAHUN 2003

TENTANG

MINUMAN KHAMAR DAN SEJENISNYA

I. UMUM

Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam telah menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hal ini sesuai dengan makna dan roh dari konstitusi negara pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 yang diimplementasikan dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh serta Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Bahwa khamar adalah salah satu perbuatan yang dilarang dan diharamkan Syari'at Islam karena minuman khamar dapat merusak akal dan kesehatan manusia, mengganggu kemaslahatan serta ketertiban umum.

Untuk efektivitas pelaksanaan qanun ini di samping adanya lembaga penyidikan dan penuntutan, juga dilakukan pengawasan yang meliputi upaya pembinaan sipelaku jarimah minuman khamar oleh Pejabat Wilayatul Hisbah. Disamping itu juga kepada masyarakat diberikan peranan untuk mencegah terjadinya jarimah minuman khamar dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Peranserta masyarakat tersebut tidak dalam bentuk main hakim sendiri.

Bentuk ancaman 'uqubat cambuk bagi sipelaku jarimah minuman khamar, dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi si pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi calon pelanggar lainnya untuk tidak melakukan jarimah. Di samping itu 'uqubat cambuk akan lebih efektif karena memberi rasa malu dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarga. Jenis 'uqubat cambuk juga berdampak pada biaya yang harus ditanggung pemerintah menjadi lebih murah dibandingkan dengan jenis 'uqubat lainnya seperti yang dikenal dalam KUHP sekarang ini.

Oleh karena materi yang diatur dalam qanun ini termasuk kompetensi Mahkamah Syar'iyah dan sementara ini qanun yang sesuai dengan kebutuhan Syariat Islam belum terbentuk, maka untuk menghindari kevakuman hukum, qanun ini juga mengatur tentang penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan 'uqubat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 s/d

Cukup jelas

Pasal 2

Angka 20

Yang dimaksud dengan sejenisnya adalah minuman yang mempunyai sifat atau kebiasaan memabukkan atas dasar kesamaan illat (sebab) yaitu memabukkan seperti bir, brendi, wiski, tuak dan sebagainya.

Pasal 1

Angka 1 s/d 21 dan seterusnya

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Baik minuman khamar itu terpisah atau bercampur dengan benda lain.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Yang dimaksud dengan penuntutan dalam pasal ini misalnya si korban menggugat perdata pejabat tersebut ke Mahkamah untuk mendapat ganti rugi.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Wilayatul Hisbah merupakan institusi di bawah Pemerintah Daerah, berwenang mengawasi pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar termasuk yang diatur dalam Qanun ini.

Ayat (3)

Cukup jelas

.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan peringatan adalah tegoran kepada tersangka untuk tidak meneruskan atau mengulangi perbuatan jarimah dengan memberitahukan ancaman 'uqubat yang dapat dikenakan karena melanggar larangan tersebut.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1) Huruf a s/d c

Cukup jelas

Ayat (1) Huruf d

Penahanan hanya dibenarkan untuk keperluan penyidikan, penuntutan dan persidangan dan tidak mempengaruhi kadar penjatuhan 'uqubat.

Ayat (1) Huruf e s/d i
Cukup jelas

Ayat (1) Huruf j
Yang dimaksud dengan hukum yang berlaku adalah ketentuan peraturan perundang-undangan dan Syari'at Islam, misalnya terhadap tersangka perempuan harus dilakukan penyidikan oleh penyidik perempuan sejauh hal itu memungkinkan

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan setiap orang adalah Pemeluk agama Islam yang mukallaf di Nanggroe Aceh Darussalam.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang ada di Nanggroe Aceh Darussalam.

Ayat (3)
Jarimah hudud adalah tindak pidana yang kadar dan jenis 'uqubatnya terikat pada ketentuan Al-Quran dan Al-Hadits.

Ayat (4)
Jarimah ta'zir adalah tindak pidana yang tidak termasuk qishash-diat dan hudud yang kadar dan jenis 'uqubatnya diserahkan kepada pertimbangan hakim.

Pasal 27
Selama Baital Mal belum terbentuk, penerimaan disetor ke Kas Daerah

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30 Huruf a
Cukup jelas

Pasal 30 Huruf b
Atas dasar putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap, pemerintah daerah atau pejabat yang berwenang memberi izin usaha, mencabut atau membatalkan izin usaha yang telah diberikan.

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM NOMOR 28**

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jln. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Jakarta 15412, Indonesia

Telp. (62-21) 747 11537, 7401925 Fax. (62-21) 7491821
Website : www.uinjkt.ac.id E-mail : syar_hukuin@yahoo.com

Nomor: Un.01/F4/PP.01.1/3 04/2011

Jakarta, 26 April 2011 M

Lamp : -

22 Jumadil Awal 1432 H

Hal : **Mohon Kesediaan Menjadi
Pembimbing Skripsi**

Yang terhormat,
Dewi Sukarti, MA
A.Bisyri Abd. Shamad, MA
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
memohon kesediaan Saudara untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa:

Nama : **Ali Geno Berutu**
NIM : **107043101922**
Fakultas : **Syariah dan Hukum**
Program Studi : **Perbandingan Mazhab dan Hukum**
Konsentrasi : **Perbandingan Fiqh**
Judul Skripsi : *Problematika Penerapan Qanun Nomor 12 Tahun
2003 Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya di
Wilayah Hukum Kota Subulussalam*

Demi penyempurnaan skripsi, pembimbing dibenarkan :

1. Mengembangkan dan menyempurnakan outline;
2. Penulisan agar merujuk kepada buku "Pedoman Penulisan Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta".

Atas kesediaan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan

Ketua Program Studi PMH,

Dr. H. Muhammad Taufiki, M.Ag

NIP. 19651119 199803 1002

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN (Sebagai Laporan);
2. Kasubag Akademik & Kemahasiswaan Fakultas Syariah dan Hukum;
3. Sekretaris Program Studi PMH Fakultas Syariah dan Hukum;
4. Arsip.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jln. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Jakarta 15412 Indonesia

Telp. (62-21) 747 11537, 7401925 Fax. (62-21) 7491821
Website : www.uinjkt.ac.id E-mail : syar_hukuin@yahoo.com

Nomor : Un.01/F4/KM.00.02/4471/2011
Lampiran : -
Hal : Mohon Data/Wawancara

Jakarta, Juli 2011

Kepada Yth,

Di

Tempat

Assalamu'laikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta menerangkan bahwa :

Nama : Ali Geno Berutu
Nomor Pokok : 107043101922
Tempat/Tanggal Lahir : Kuta Tengah, 17 Februari 1987
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan/Konsentrasi : PMH/PMF
Alamat : Kampung Poncol, Cirendeu, Ciputat.
Telp : 085695563487

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta yang sedang menyelesaikan skripsi dengan
Topik/Judul :

*"Problematika Penerapan Qanun No. 12 Tentang Khamar dan Sejenisnya
di Wilayah Hukum Kota Subulussalam, NAD "*

Untuk melengkapi bahan/data yang berkaitan dengan
penulisan/pembahasan Topik/, dimohon kiranya Bapak/Ibu/Saudara/i
dapat membantu/menerima yang bersangkutan untuk wawancara.

Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i, kami ucapkan banyak terima
kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

A.n DEKAN,

Pembantu Dekan Bid. Akademik

Dr. H. Ahmad Mukri Aji, M.A.
NIP. 195703121985031003

Tembusan :

- 1.Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN
- 2.Arsip.

PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
DINAS SYARI'AT ISLAM

JL. MALAIKUNSALEH NO. TELP.
SUBULUSSALAM

SURAT KETERANGAN

Nomor: 451/65/J/2011

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Burhanuddin Berkat, SH
Nip : 19570626 198303 1 010
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I (IV/b)
Jabatan : Kepala Dinas Syari'at Islam Kota Subulussalam
Alamat : Subulussalam

Menerangkan bahwa Saudara :

Nama : Ali Geno Berutu
NIM : 107043101922
Fak/Jur : Syari'ah/PMH

Yang tersebut namanya di atas benar telah melakukan penelitian di Dinas Syari'at Islam Kota Subulussalam dengan judul skripsi "EFEKTIFITAS PENERAPAN QANUN NO 12 TAHUN 2003 TENTANG MINUMAN KHAMAR DAN SEJENISNYA DI WILAYAH HUKUM KOTA SUBULUSSALAM-NAD".

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Subulussalam, 21 Februari 2011
Kepala Dinas Syari'at Islam
Kota Subulussalam

Drs. H. Burhanuddin Berkat, SH
Pembina Tk. I/Nip.19570626 198303 1 010

PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
WILAYATUL HISBAH KOTA SUBULUSSALAM

JALAN MALIKUL SALEH NO. ... KECAMATAN SIMPANG KIRI

TELP. 0627 - 31908 FAX. 0627 - 31908

SUBULUSSALAM

SURAT KETERANGAN

Nomor: 045/034 Pol PP-WH/2011

Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kota Subulussalam, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Ali Geno Berutu

Nomor Pokok : 107043101922

Tempat/Tanggal Lahir : Kuta Tengah, 17 Februari 1987

Semester : VII (Tujuh)

Jurusan/Konsentrasi : PMH/PMF

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda Ciputat

Sehubungan dengan Surat Kementerian Agama Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah Dan Hukum, Nomor: Un.01/F4/KM.00.02/775/2011.

Adalah benar yang namanya tersebut diatas telah melakukan wawancara tentang Efektifitas Penerapan Qanun No 12 Tentang Minuman Khamar Di Wilayah Hukum Kota Subulussalam-NAD, di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kota Subulussalam, pada tanggal 21 Februari 2011.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Subulussalam, 22 Februari 2011

Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Dan Wilayatul Hisbah Kota Subulussalam

SAHIDIN, SH

Penata NIP. 19640911 199003 1 004

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SYARIAH ISLAM
KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2011**

Subulussalam, 11 Januari 2011
Kepala Dinas Syariah Islam
Kota Subulussalam

Drs. H. Burhanuddin Berkat, SH
Pembina TKI/IV/b Nip. 19570626 198303 1 010

17-8

TAHUN

LAPORAN REKAPITULASI JUMLAH PENYELESAIAN KASUS JINAYAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KOTA SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH
: 2010

No	Kota Subulussalam	Jumlah Kasus yang ditangani					Berdasarkan Jenis Kelamin		Proses Penyelesaian Kasus				Jumlah Kasus	Ket
		Qanun 11/2002	Qanun 12/2003	Qanun 13/2003	Qanun 14/2003		Laki-laki	Perempuan	Pembinaan Di Kantor	Penyelesaian Adat	Tahap Jaksa/P21	Putusan Mahkamah		
1	Januari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Februari	-	-	1	-	Lk	Lk	Pr	√	√	-	-	3	-
3	Maret	-	-	-	2	Lk	Lk	Pr	√	√	-	-	2	-
4	April	-	-	-	1	Lk	Lk	Pr	√	√	-	-	5	-
5	Mei	-	-	-	3	Lk	Lk	Pr	√	√	-	-	2	-
6	Juni	-	-	-	2	Lk	Lk	Pr	√	√	-	-	8	-
7	Juli	-	-	-	7	Lk	Lk	Pr	√	√	-	-	25	-
8	Agustus	-	-	-	1	Lk	Lk	Pr	√	√	-	-	1	-
9	September	-	-	-	-	Lk	Lk	Pr	√	√	-	-	2	-

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA SUBULUSSALAM
WILAYATUL HISBAH KOTA SUBULUSSALAM
SAHIDIN SH
19640911 199003 1 004